



Desa Bikang
Kabupaten Bangka Selatan



PUBLIKASI **PAKSIAN**

BIKANG

Pendataan Lengkap Kependudukan,
Sosial, Agraria, dan Hunian



KEPENDUDUKAN



SOSIAL



AGRARIA



HUNIAN





Desa Bikang
Kabupaten Bangka Selatan



PUBLIKASI PAKSIAN

BIKANG

Pendataan Lengkap Kependudukan,
Sosial, Agraria, dan Hunian



KEPENDUDUKAN



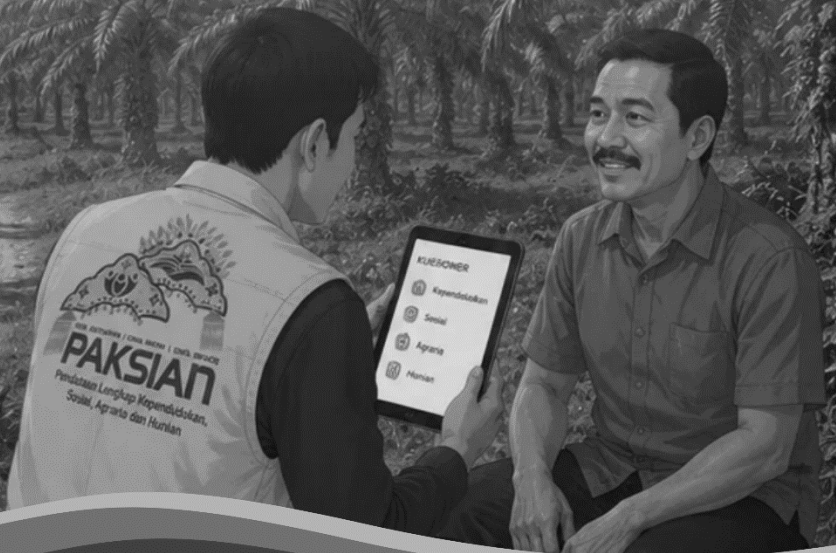
SOSIAL



AGRARIA



HUNIAN



PUBLIKASI PAKSIAN BIKANG 2026

Penyusun Naskah : Agen Statistik Desa Bikang

Penyunting : Agen Statistik Desa Bikang

Gambar Kulit : Agen Statistik Desa Bikang

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan dan Pemerintah Desa Bikang.

PUBLIKASI PAKSIAN BIKANG TAHUN 2026

Tim Penyusun

Pengarah : Zulfani

Penanggung Jawab : Eko Cahyono, S.Kom.

Naskah : Agen Statistik Desa Bikang

Data/Grafik : Agen Statistik Desa Bikang

Gambar Kulit : Agen Statistik Desa Bikang

Penyunting : Agen Statistik Desa Bikang

Kata Pengantar

Paksian Bikang atau Lengkap Kependudukan, Sosial, Agraria dan Hunian Desa Bikang merupakan bagian dari kegiatan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Bangka Selatan. Paksian hadir untuk memotret kondisi riil masyarakat secara mendalam, mulai dari keberadaan keluarga, aspek sosial pendidikan, hingga potensi agraria dan kualitas hunian. Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan salah satu dari lima arahan Presiden dalam misi Nawacita serta visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan infrastruktur.

Dengan diterbitkannya publikasi ini, diharapkan kebutuhan data terkait kependudukan, sosial, agraria, dan hunian dapat terpenuhi. Data ini akan menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam mengidentifikasi kelompok rentan seperti lansia dan anak putus sekolah, memetakan rumah tidak layak huni, serta merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan dan penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pihak dan menjadi inspirasi dalam pengelolaan data di tingkat lokal.

Toboali, 20 Juli 2026

Pemerintah Desa Bikang

Kepala Desa Bikang



Zulfani

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	viii
Ulasan Singkat	1
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Tujuan	6
1.3. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II METODOLOGI.....	8
2.1. Sumber Data	8
2.2. Konsep dan Definisi	8
BAB III HASIL PAKSIAN BIKANG.....	28
3.1. KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL	28
3.1.1. Jumlah Penduduk di Desa Bikang Tahun 2026	28
3.1.2. Jumlah Keluarga di Desa Bikang Tahun 2026	29
3.1.3. Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin	30
3.1.4. Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Agama	32
3.1.5. Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Status Perkawinan....	33
3.1.6. Keterangan Migrasi Seumur Hidup Penduduk di Desa Bikang	35
3.1.7. Keterangan Lansia di Desa Bikang.....	38
3.1.8. Keterangan Anak Putus Sekolah di Desa Bikang.....	39
3.2. HUNIAN	41
3.3.1. Jumlah Bumbung Rumah Tempat Tinggal.....	41
3.3.2. Keluarga yang Tinggal dalam Satu Bangunan Tempat Tinggal....	42

3.3.3.	Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal.....	44
3.2.4.	Bukti Penguasaan Tempat Tinggal.....	46
3.2.5.	Jenis Atap Terluas	48
3.2.6.	Jenis Dinding Terluas	50
3.2.7.	Jenis Lantai Terluas	53
3.2.8.	Rata-Rata Luas Lantai	56
3.2.9.	<i>Sufficient Living Space</i>	57
3.2.9.	Sumber Air Untuk Minum	59
3.2.10.	Sumber Air Untuk Mandi/Cuci/DII	62
3.2.11.	Sumber Penerangan	64
3.2.12.	Fasilitas BAB (Buang Air Besar).....	65
3.2.13.	Jenis Kloset yang Digunakan	68
3.2.14.	Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja	70
3.2.15.	Ketahanan Bangunan	72
3.2.16.	Sanitasi Layak.....	75
3.2.17.	Air Minum Layak	78
3.2.18.	Air Minum Aman	81
3.2.19.	Air Minum Bukan Air Permukaan.....	84
3.2.20.	Air Minum Layak Dasar	85
3.2.21.	Rumah Layak Huni.....	86
3.3.	AGRARIA.....	89
3.3.1.	Keberadaan Rumah Tangga yang Mengusahakan Pertanian/Perkebunan	89
3.3.2.	Keberadaan Rumah Tangga yang Mengusahakan Pertanian dengan Lahan Pertaniannya Berada di Dalam Desa Bikang.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....		95
LAMPIRAN.....		96
Lampiran 1. Kuesioner Paksian Bikang Tahun 2026		96

Daftar Gambar

Gambar 1. Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Dusun, 2026	28
Gambar 2. Jumlah Keluarga di Desa Bikang Menurut Dusun, 2026	29
Gambar 3. Persentase Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2026.....	30
Gambar 4. Persentase Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Agama Tahun 2026	32
Gambar 5. Persentase Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Status Perkawinan Tahun 2026.....	33
Gambar 6. Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Status Perkawinan dan Dusun Tahun 2026.....	34
Gambar 7. Persentase Migrasi Seumur Hidup di Desa Bikang Tahun 2026.....	36
Gambar 8. Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Keterangan Migrasi Seumur Hidup dan Dusun Tahun 2026	37
Gambar 9. Persentase Rumah Tangga yang Tercatat Memiliki Penduduk Lansia di Desa Bikang, 2026.....	38
Gambar 10. Persentase Rumah Tangga yang Tercatat Memiliki Anak Putus Sekolah di Desa Bikang, 2026.....	39
Gambar 11. Jumlah Rumah Tangga yang Tercatat Memiliki Anak Putus Sekolah di Desa Bikang Menurut Dusun Tahun 2026.....	40
Gambar 12. Jumlah Bumbung Rumah di Desa Bikang Menurut Dusun, 2026	41

Gambar 13. Rata-Rata Jumlah Keluarga dalam Satu Bangunan dan Rata-Rata Jumlah Penghuni Rumah di Desa Bikang, 2026.....	43
Gambar 14. Persentase Bangunan di Desa Bikang Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2026	44
Gambar 15. Persentase Bangunan di Desa Bikang dengan SHM Sendiri, 2026	46
Gambar 16. Bukti Penguasaan Bangunan di Desa Bikang 2026.....	46
Gambar 17. Persentase Hunian di Desa Bikang Menurut Jenis Atap Terluas, 2026 ..	48
Gambar 18. Persentase Hunian di Desa Bikang Menurut Jenis Dinding Terluas, 2026	51
Gambar 19. Persentase Hunian di Desa Bikang Menurut Jenis Lantai Terluas, 2026	54
Gambar 20. Rata-Rata Luas Lantai Hunian di Desa Bikang, 2026.....	56
Gambar 21. Persentase Hunian di Desa Bikang Menurut Kecukupan Luas Lantai Per Kapita, 2026.....	58
Gambar 22. Persentase Hunian di Desa Bikang Menurut Sumber Air Utama Untuk Minum, 2026	59
Gambar 23. Persentase Bangunan Tempat Tinggal di Desa Bikang Menurut Ketahanan Bangunan, 2026.....	73
Gambar 24. Jumlah Bangunan Tempat Tinggal di Desa Bikang Berdasarkan Dusun dan Status Ketahanan Bangunan, 2026.....	74
Gambar 25. Persentase Rumah Tangga di Desa Bikang Menurut Akses Terhadap Sanitasi Layak, 2026.....	76

Gambar 26. Rumah Tangga Berdasarkan Dusun dan Akses Terhadap Sanitasi Layak di Desa Bikang, 2026	77
Gambar 27. Persentase Rumah Tangga di Desa Bikang Menurut Akses Terhadap Air Minum Layak, 2026.....	79
Gambar 28. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Dusun dan Akses Terhadap Air Minum Layak di Desa Bikang, 2026	80
Gambar 29. Persentase Rumah Tangga di Desa Bikang Menurut Akses Terhadap Air Minum Aman, 2026.....	82
Gambar 30. Rumah Tangga di Desa Bikang Menurut Akses Terhadap Air Minum Aman Berdasarkan Dusun, 2026	83
Gambar 31. Persentase Rumah Tangga di Desa Bikang Menurut Akses Terhadap Air Minum Bukan Air Permukaan, 2026.....	84
Gambar 32. Persentase Rumah Tangga di Desa Bikang Menurut Akses Terhadap Air Minum Bukan Air Permukaan, 2026.....	85
Gambar 33. Persentase Rumah Tangga di Desa Bikang Menurut Akses Terhadap Rumah Layak Huni, 2026.....	87
Gambar 34. Rumah Tangga Berdasarkan Dusun dan Akses Terhadap Rumah Layak Huni di Desa Bikang, 2026.....	88
Gambar 35. Keberadaan Rumah Tangga yang Mengusahakan Pertanian /Perkebunan di Desa Bikang Tahun 2026	89
Gambar 36. Keberadaan Rumah Tangga yang Mengusahakan Pertanian /Perkebunan Berdasarkan Dusun di Desa Bikang Tahun 2026.....	90

Gambar 37. Keberadaan Rumah Tangga yang Mengusahakan Pertanian /Perkebunan Berdasarkan Lokasi Lahan di Desa Bikang Tahun 2026	92
Gambar 38. Keberadaan Rumah Tangga yang Mengusahakan Pertanian /Perkebunan Berdasarkan Lokasi Lahan dan Dusun di Desa Bikang Tahun 2026	93

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis kelamin dan Dusun Tahun 2026.....	31
Tabel 2. Jumlah Bumbung Bangunan Tempat Tinggal Berdasarkan Dusun dan Status Kepemilikan di Desa Bikang, 2026.....	45
Tabel 3. Jumlah Bumbung Bangunan Tempat Tinggal Berdasarkan Dusun dan Jenis Atap Terluas di Desa Bikang, 2026.....	49
Tabel 4. Jumlah Bumbung Bangunan Tempat Tinggal Berdasarkan Dusun dan Jenis Dinding Terluas di Desa Bikang, 2026.....	52
Tabel 5. Jumlah Bumbung Bangunan Tempat Tinggal Berdasarkan Dusun dan Jenis Lantai Terluas di Desa Bikang, 2026.....	55
Tabel 6. Jumlah Sumber Air minum Berdasarkan Dusun dan Jenis Sumber Air Minum di Desa Bikang, 2026.....	60
Tabel 7. Jumlah Sumber Air Mandi Berdasarkan Dusun dan Jenis Sumber Air yang digunakan di Desa Bikang, 2026.....	62
Tabel 8. Jumlah Rumah Tangga yang Berdasarkan Sumber Penerangan Utama dan Dusun di Desa Bikang, 2026.....	64
Tabel 9. Jumlah Fasilitas BAB Berdasarkan Dusun dan Kepemilikan Fasilitas BAB di Desa Bikang, 2026.....	66
Tabel 10. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Dusun dan Jenis Kloset yang digunakan di Desa Bikang, 2026.....	68

Tabel 11. Jenis Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja Berdasarkan Dusun di Desa Bikang, 2026.....	70
--	----

Ulasan Singkat

Kebutuhan akan data yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi demografi, sosial, agraria, dan hunian dirasakan oleh masyarakat Desa Bikang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Untuk memperoleh gambaran yang utuh, BPS Kabupaten Bangka Selatan melalui program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) melaksanakan kegiatan PAKSIAN Bikang Tahun 2026 sebagai instrumen penting dalam mengisi kekosongan data mikro di tingkat desa.

Berdasarkan hasil pendataan PAKSIAN Bikang Tahun 2026, tercatat sebanyak 349 rumah tangga dengan jumlah penduduk mencapai 1.174 jiwa yang tersebar di tiga dusun, yaitu Dusun I, Dusun II, dan Dusun III. Dari sisi demografi, struktur penduduk Desa Bikang berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Berdasarkan status perkawinan, sebagian besar penduduk berada pada kelompok berstatus kawin sebanyak 598 jiwa (50,94%), diikuti oleh penduduk belum kawin sebanyak 512 jiwa (43,61%), sedangkan penduduk dengan status cerai mati sebanyak 45 jiwa (3,83%) dan cerai hidup sebanyak 19 jiwa (1,62%). Dari sisi mobilitas penduduk, mayoritas penduduk merupakan penduduk asli Desa Bikang, sedangkan penduduk migran seumur hidup tercatat sebanyak 87 jiwa (7,41%) yang tersebar di beberapa dusun. Pendataan ini juga memberikan gambaran mengenai karakteristik sosial masyarakat serta kondisi kependudukan sebagai dasar dalam memahami dinamika pembangunan di tingkat desa.

Dalam aspek perumahan dan lingkungan, hasil pendataan menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Desa Bikang telah memiliki bangunan tempat tinggal dengan kondisi yang relatif baik. Dari sisi kepemilikan, bangunan rumah tinggal didominasi oleh rumah milik sendiri. Karakteristik fisik bangunan menunjukkan bahwa sebagian besar rumah menggunakan atap terluas berupa asbes sebanyak 268 unit (76,93%), diikuti oleh genteng sebanyak 71 unit (20,40%) dan seng sebanyak 10 unit (2,87%). Berdasarkan jenis dinding, mayoritas rumah telah menggunakan dinding tembok sebanyak 321 unit (91,98%), sedangkan penggunaan dinding kayu sebanyak

28 unit (8,02%). Sementara itu, berdasarkan jenis lantai, sebagian besar rumah menggunakan lantai keramik sebanyak 252 unit (72,21%), semen sebanyak 95 unit (27,22%), dan kayu sebanyak 2 unit (0,57%). Rata-rata luas lantai hunian di Desa Bikang mencapai 105,96 m², dengan luas rata-rata tertinggi terdapat di Dusun II sebesar 110,37 m², kemudian Dusun III sebesar 105,96 m², dan Dusun I sebesar 102,35 m².

Selanjutnya, dari segi fasilitas dasar dan sanitasi, kondisi rumah tangga di Desa Bikang menunjukkan capaian yang cukup baik. Sebanyak 329 rumah tangga (94,27%) telah memiliki fasilitas BAB yang digunakan sendiri, sementara sisanya menggunakan fasilitas bersama atau MCK umum. Berdasarkan jenis kloset, sebanyak 343 rumah tangga (98,28%) telah menggunakan kloset leher angsa, sedangkan masih terdapat sebagian kecil rumah tangga yang menggunakan plengsengan tanpa tutup dan cemplung/cubluk. Dari sisi tempat pembuangan akhir kotoran/tinja, sebanyak 339 rumah tangga (97,13%) telah menggunakan tangki septik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Bikang telah memiliki akses sanitasi yang lebih aman. Berdasarkan indikator sanitasi layak, tercatat sebanyak 341 rumah tangga (97,71%) telah memiliki akses sanitasi layak.

Selain sanitasi, aspek ketersediaan air juga menjadi bagian penting dalam menggambarkan kualitas hunian masyarakat. Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 324 rumah tangga (92,84%) telah memiliki akses terhadap air minum layak, sedangkan 25 rumah tangga (7,16%) masih berada dalam kategori tidak layak. Sumber air utama rumah tangga didominasi oleh penggunaan sumur terlindung sebanyak 251 rumah tangga, diikuti oleh leding sebanyak 58 rumah tangga, sumur tak terlindung sebanyak 23 rumah tangga, air isi ulang sebanyak 11 rumah tangga, dan sumur bor/pompa sebanyak 6 rumah tangga. Selain itu, akses terhadap listrik juga menunjukkan kondisi yang sangat baik, dengan 346 rumah tangga (99,14%) telah menggunakan listrik PLN dengan meteran.

Tidak kalah penting, dari sisi potensi agraria, hasil pendataan menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi salah satu aktivitas ekonomi masyarakat Desa Bikang. Sebanyak 112 rumah tangga (32,09%) tercatat mengusahakan kegiatan pertanian/perkebunan, baik menggunakan lahan yang berada di dalam maupun di luar wilayah Desa Bikang. Sebagian besar rumah tangga tersebut mengusahakan lahan yang berada di dalam Desa Bikang dengan proporsi sebesar 89,29%, sedangkan sisanya mengusahakan lahan di luar desa sebesar 10,71%. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor agraria masih memiliki peran dalam mendukung perekonomian masyarakat serta menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan dalam pembangunan desa.

Keseluruhan data yang dikumpulkan melalui PAKSIAN Bikang Tahun 2026 memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi masyarakat, kualitas hunian, akses pelayanan dasar, serta potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Ketersediaan data mikro yang lengkap dan terperinci ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi Pemerintah Desa Bikang dalam merumuskan evidence-based policy secara tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Desa Bikang..

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan menuntut ketersediaan data yang presisi sebagai fondasi utama pengambilan kebijakan. Selama ini, Desa Bikang menghadapi tantangan dalam akurasi data kependudukan yang masih bergantung pada metode konvensional, yakni pengumpulan fotokopi Kartu Keluarga melalui tingkat RT. Praktik ini sering kali menimbulkan kesenjangan antara data administratif dan kondisi faktual, yang berakibat pada ketidaktepatan sasaran program pembangunan. Melalui pendataan lengkap, desa berupaya menghadirkan basis data yang mutakhir guna mendukung pencapaian SDGs Target 17.18, yang menekankan pada peningkatan ketersediaan data berkualitas tinggi dan andal. Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata implementasi Satu Data Desa Indonesia (SDDI), di mana desa berperan aktif sebagai subjek produsen data yang berdaulat, memastikan informasi dari tingkat tapak terintegrasi secara nasional untuk menghapuskan ego sektoral dalam pengelolaan data.

Dalam lingkup kependudukan, perhatian khusus diberikan pada kelompok rentan guna memastikan prinsip *Leave No One Behind (LNOB)*. Pendataan lansia menjadi prioritas utama untuk mendukung keberlanjutan program Posyandu Lansia, yang selaras dengan SDGs tujuan ke-3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) serta amanat RPJMN 2026–2029 mengenai penguatan sistem perlindungan sosial sepanjang hayat. Selain itu, desa perlu menangkap fenomena anak putus sekolah yang krusial untuk mendukung SDGs tujuan ke-4 (Pendidikan Berkualitas). Langkah ini menjadi semakin relevan mengingat mandat RPJMN dalam mempercepat pemerataan pendidikan melalui sinergi antar lembaga, seperti kolaborasi Kementerian Agama dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Melalui kerangka Satu Data Desa, informasi anak putus sekolah akan tersaji sehingga memudahkan intervensi program pembinaan yang lebih akurat dan transparan.

Sejalan dengan penguatan data individu, informasi mengenai profil rumah tangga dan standar hunian layak menjadi instrumen vital dalam merumuskan kebijakan

infrastruktur. Pendataan ini bertujuan mengidentifikasi rumah tangga yang membutuhkan intervensi fisik, seperti program renovasi rumah tidak layak huni. Hal ini berkaitan erat dengan SDGs tujuan ke-11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), serta target RPJMN 2026–2029 yang memprioritaskan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui perbaikan kantong permukiman. Dengan standarisasi Satu Data Desa, data hunian ini tidak hanya berhenti di arsip desa, tetapi menjadi referensi valid bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan stimulan perumahan agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran.

Sebagai pelengkap dalam pemetaan sumber daya desa, dimensi agraria diintegrasikan untuk menangkap profil produktivitas lahan. Pendataan ini bertujuan memetakan pemanfaatan lahan produktif maupun lahan tidur untuk mengidentifikasi potensi hasil bumi yang ada. Integrasi data agraria ke dalam sistem Satu Data Desa memungkinkan Desa Bikang memiliki basis perencanaan ekonomi yang tangguh, di mana setiap kebijakan pemanfaatan lahan didasarkan pada bukti empiris yang kuat demi kemandirian ekonomi seluruh warga.

Sebagai langkah konkret untuk menjawab berbagai tantangan data tersebut, Pemerintah Desa Bikang bersama dengan BPS Kabupaten Bangka Selatan melalui program Desa Cantik melaksanakan PAKSIAN (Pendataan Lengkap Kependudukan, Sosial, Agraria, dan Hunian). Program kolaboratif ini dirancang sebagai instrumen pengumpulan data mikro yang komprehensif untuk memotret realitas kehidupan masyarakat secara utuh dengan standar metodologi statistik yang berkualitas. Melalui PAKSIAN, Desa Bikang tidak hanya sekadar mengumpulkan angka, tetapi sedang membangun sistem dasar dalam menyusun rencana kerja yang lebih presisi, memastikan setiap program tepat sasaran, serta memperkuat posisi desa dalam mengakses berbagai skema bantuan melalui penyediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih dari itu, inisiatif ini dapat menjadi praktik baik (*best practice*) yang menginspirasi desa-desa lain di Kabupaten Bangka Selatan dan wilayah lainnya. Dengan data yang kuat, pembangunan perumahan di desa tidak lagi berbasis asumsi, melainkan kebutuhan nyata masyarakat.

1.2. Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk menggambarkan data yang akurat dan terkini mengenai kondisi kependudukan, profil sosial, produktivitas pertanian, serta kualitas hunian di Desa Bikang. Data ini akan menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam mengidentifikasi kelompok rentan seperti lansia dan anak putus sekolah, memetakan rumah tidak layak huni, serta merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

1.3. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam publikasi ini terbagi ke dalam tiga bab utama. Bab pertama adalah Pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Bab kedua membahas Metodologi, yang mencakup sumber data serta konsep dan definisi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini. Bab ketiga adalah Hasil Pendataan Paksian Bikang, yang berisi gambaran umum kondisi kependudukan, profil sosial, produktivitas pertanian, serta kualitas hunian di Desa Bikang.

Publikasi ini menyajikan informasi hasil pengumpulan data dari Paksian Bikang mengenai kondisi kependudukan, pertanian, serta kualitas hunian di Desa Bikang tahun 2026. Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang menggambarkan kondisi kependudukan, sosial, pertanian, dan kualitas hunian. Kondisi Kependudukan berupa data jumlah keluarga dan penduduk berdasarkan dusun, jenis kelamin, agama, status perkawinan juga data mengenai keterangan migrasi seumur hidup. Produktivitas pertanian berdasarkan keberadaan rumah tangga yang mengusahakan pertanian serta kualitas hunian berdasarkan status penguasaan tempat tinggal, meliputi status kepemilikan rumah, status tanah, serta luas lantai. Kondisi fisik bangunan yang dikaji mencakup jenis bangunan sensus yang dihuni, jenis atap, dinding, dan lantai terluas. Selain itu, juga disajikan informasi mengenai fasilitas tempat tinggal, seperti sumber air minum rumah tangga, sumber air untuk mandi atau mencuci, jarak antara fasilitas pembuangan kotoran (tinja) dengan sumber air minum, fasilitas buang air besar, jenis

bahan bakar yang digunakan, serta sumber penerangan utama. Lebih lanjut, publikasi ini juga menyajikan indikator penting seperti sanitasi layak, air minum layak, dan rumah layak huni, yang menjadi acuan dalam pemenuhan data perumahan dan permukiman.

Selain aspek kependudukan, pertanian, dan hunian, publikasi ini turut memuat informasi mengenai karakteristik di Desa Bikang, khususnya data keberadaan penduduk jumlah lanjut usia (lansia) di dalam rumah tangga penduduk dan data keberadaan anak berusia 7-18 tahun yang putus sekolah, sebagai bagian dari potret kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relevan dalam perencanaan pembangunan desa.

BAB II METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari hasil kegiatan Paksian Bikang tahun 2026, yaitu pendataan kondisi kependudukan, profil sosial, produktivitas pertanian, serta kualitas hunian yang dilakukan secara pencacahan lengkap terhadap seluruh keluarga di Desa Bikang. Tidak seperti survei makro semacam Susenas yang hanya menggunakan sampel untuk estimasi hingga tingkat kabupaten/kota, Paksian Bikang dirancang untuk memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh pada tingkat desa hingga dusun.

Pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh petugas menggunakan aplikasi berbasis android PAKSIAN BIKANG, sebuah instrumen digital mutakhir yang memudahkan pencatatan seluruh variabel kependudukan, aspek sosial, hingga produktivitas pertanian di tingkat desa. Karena menggunakan pendekatan pencacahan lengkap, hasil yang diperoleh dari Paksian Bikang memberikan gambaran riil dan terperinci mengenai kondisi di seluruh wilayah Desa Bikang, hingga ke tingkat dusun. Dengan cakupan dan kedalaman data tersebut, publikasi ini menyajikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan tepat sasaran di tingkat desa.

2.2. Konsep dan Definisi

a. Keluarga

Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK). Jika tidak memiliki Kartu Keluarga, konsep keluarga pada UU Nomor 52 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

b. Anggota keluarga, adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan orang-orang yang telah tinggal / menetap atau

bermaksud menetap bersama dengan keluarga tersebut selama setahun atau lebih, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

c. Rumah Tangga

Rumah tangga dibedakan menjadi rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga yang dicakup dalam Paksian Bikang hanya rumah tangga biasa. Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah kebutuhan sehari-hari diurus bersama menjadi satu. Selain rumah tangga biasa, yang biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak. Yang termasuk juga sebagai rumah tangga biasa antara lain:

1. Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri-sendiri.
2. Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu blok sensus yang sama.
3. Rumah tangga yang menerima anak kos kurang dari 10 orang dengan makan. Anak kos tersebut tercatat sebagai anggota rumah tangga.

Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa. Rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) kurang dari 10 orang dianggap satu rumah tangga biasa dengan indekos. Jika yang mondok dengan makan 10 orang atau lebih, maka rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan merupakan rumah tangga biasa, sedangkan yang mondok dengan makan dianggap rumah tangga khusus. Pengurus asrama, pengurus panti asuhan, pengurus lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak istri, serta anggota rumah tangga lainnya dianggap rumah tangga biasa.

Rumah tangga khusus meliputi:

1. Orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu suatu tempat tinggal yang mengurus kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya asrama perawat, asrama mahasiswa, asrama TNI (tangsi). Anggota TNI yang tinggal bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya bukan rumah tangga khusus.
2. Orang-orang yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan dan sejenisnya.
3. Sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekost) yang berjumlah lebih besar atau sama dengan 10 orang.

d. Anggota Rumah tangga (ART)

Anggota Rumah Tangga (ART) merupakan semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga (KRT, suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili lain, pembantu rumah tangga atau ART lainnya) yang sudah tinggal 1 tahun atau lebih, atau kurang dari satu tahun tetapi berniat untuk menetap.

Termasuk ART:

- Bayi yang baru lahir;
- Tamu yang sudah tinggal 1 tahun atau lebih, meskipun belum berniat untuk menetap (pindah datang). Termasuk tamu menginap yang belum tinggal 1 tahun, tetapi sudah meninggalkan rumahnya 1 tahun atau lebih;
- Orang yang tinggal kurang dari 1 tahun, tetapi berniat untuk menetap (pindah datang);
- Pembantu rumah tangga, tukang kebun, atau sopir yang tinggal dan makannya bergabung dengan rumah tangga majikan;
- Orang yang mondok dengan makan (indekos) jumlahnya kurang dari 10 orang;

- KRT yang bekerja di tempat lain (luar BS) dan tidak pulang setiap hari, tetapi pulang secara periodik (kurang dari 1 tahun) seperti pelaut, pilot, pedagang antar pulau, atau pekerja tambang.

Tidak Termasuk ART:

- ART yang tinggal di tempat lain (luar rumah tangga/BS), misalnya untuk sekolah atau bekerja, meskipun kembali ke orang tuanya seminggu sekali atau ketika libur, dianggap telah membentuk rumah tangga sendiri atau bergabung dengan rumah tangga lain di tempat tinggalnya sehari hari;
- Seseorang yang sudah bepergian 1 tahun atau lebih, meskipun belum jelas akan pindah;
- Orang yang sudah pergi kurang dari 1 tahun, tetapi berniat untuk pindah;
- Pembantu rumah tangga yang tidak tinggal di rumah tangga majikan;
- Orang yang mondok tidak dengan makan;
- Orang yang mondok dengan makan (indekos) 10 orang atau lebih.

e. Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal

Milik Sendiri, Status kepemilikan bangunan tempat tinggal di mana tempat tinggal tersebut merupakan milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

Kontrak/Sewa, Kontrak adalah status kepemilikan bangunan tempat tinggal di mana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya satu atau dua tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian

kontrak baru. Sewa adalah status kepemilikan bangunan tempat tinggal di mana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewa secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

Bebas Sewa, Status kepemilikan bangunan tempat tinggal di mana tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (baik famili/bukan famili/orang tua yang tinggal di tempat lain) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

Dinas, Status kepemilikan bangunan tempat tinggal di mana tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi/perusahaan berbadan hukum tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak. Rumah dinas yang dimaksud adalah rumah dinas yang ditempati oleh rumah tangga yang minimal salah satu ART-nya merupakan penerima fasilitas rumah dinas. Jika rumah tangga menempati rumah dinas yang peruntukannya bukan untuk minimal salah satu ART-nya, maka dianggap kontrak/sewa/bebas sewa

Lainnya, Misalnya rumah adat.

f. Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal

Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART, SHM adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut. Status SHM adalah status yang paling kuat untuk kepemilikan lahan karena lahan sudah menjadi milik seseorang tanpa campur tangan ataupun kemungkinan kepemilikan pihak lain. Status SHM juga tidak terbatas waktunya. SHM dalam pilihan ini merupakan SHM atas nama ART.

SHM bukan atas nama ART dengan perjanjian pemanfaatan tertulis, SHM bukan atas nama ART tetapi disertai dengan perjanjian pemanfaatan tertulis, artinya ART berhak memanfaatkan bangunan tempat tinggal tersebut berdasarkan perjanjian

yang telah disepakati. Contoh: Rumah warisan (milik sendiri) yang disertai perjanjian pemanfaatan tertulis dan Rumah yang telah dibeli, tetapi belum balik nama.

SHM bukan atas nama ART tanpa perjanjian pemanfaatan tertulis, SHM bukan atas nama ART tanpa perjanjian pemanfaatan tertulis contohnya: rumah warisan (milik sendiri) yang tidak disertai perjanjian pemanfaatan tertulis.

Sertifikat selain SHM (SHGB, SHMSRS), Jenis-jenis sertifikat selain Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS/SHSRS/SHMRS). *Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)* adalah sertifikat yang menjadikan pemegang SHGB berhak mendirikan bangunan di atas tanah yang memiliki sertifikat jenis tersebut. Akan tetapi, kepemilikan tanah atau lahan menjadi milik negara. SHGB memiliki batas waktu tertentu, biasanya 20 tahun. Pemilik SHGB bisa saja meningkatkan status kepemilikan atas tanah yang mereka kuasai dalam bentuk SHM. Biasanya, peningkatan status sertifikat dari SHGB ke SHM terjadi karena di atas tanah tersebut didirikan bangunan tempat tinggal. Sepanjang bidang tanah tersebut terdapat bangunan yang dipergunakan untuk rumah tinggal, dapat ditingkatkan menjadi hak milik. *Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS/SHSRS/SHMRS)* adalah tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan (PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun). Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Istilah satuan rumah susun mengacu pada unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

Surat bukti lainnya (Girik, AJB, Letter C, dll.). Girik adalah lahan bekas hak milik adat yang belum didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Girik bukanlah sertifikat melainkan surat tanda pembayaran pajak atas lahan, yang merupakan bukti bahwa seseorang menguasai sebidang tanah. Girik tidak kuat status hukumnya seperti sertifikat, tetapi girik bisa dijadikan dasar untuk membuat sertifikat tanah. Surat tanda bukti ini dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan digunakan untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Akta Jual Beli (AJB)* adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT/Notaris) yang berupa akta perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli atas tanah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal responden. AJB tidak dimasukkan di dalam jenis sertifikat kepemilikan karena AJB hanya merupakan bukti hukum telah terjadinya transaksi jual-beli antara kedua belah pihak. *Letter C* adalah buku yang dijadikan catatan penarikan pajak. Kutipan letter C terdapat di kantor kelurahan sedangkan induk dari kutipan letter C terdapat di kantor pelayanan PBB. *Surat bukti lainnya*, misalnya surat bukti berupa wasiat, surat adat, alas hak lainnya.

Tidak punya, Responden tidak memiliki bukti kepemilikan tanah apapun.

g. Luas Lantai Rumah Bangunan Tempat Tinggal

Luas lantai yang dimaksud adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap rumah). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai, seperti lumbung padi; kandang ternak; lantai jemur (hamparan semen); dan ruangan khusus untuk usaha, misalnya warung. Luas lantai bangunan bertingkat adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati. Taman yang memiliki atap menyatu dengan atap rumah (berada di dalam rumah) maupun taman yang berada di samping rumah, namun berada di bawah atap rumah dan merupakan satu kesatuan struktur, maka taman dihitung luas lantainya.

h. Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga KRT/ART yang mendiaminya terlindung dari terik matahari, hujan, dan sebagainya. **Beton** adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air. **Genteng** adalah atap yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar, termasuk genteng keramik, metal/logam, tanah liat, atau fiber/polycarbonate. **Seng** adalah atap yang terbuat dari bahan seng. Atap seng berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut decrabond (seng yang dilapisi epoxy dan acrylic), dan galvalum. **Kayu/sirap** adalah atap yang terbuat dari kayu/kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi. **Asbes** adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Pada umumnya atap asbes berbentuk gelombang. **Bambu/jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia**, Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru. Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam. Lainnya adalah jenis bahan bangunan misalnya kardus, kaca, dll.

i. Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. **Tembok** adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari pasangan batu merah dan diplester namun dengan tiang kolom berupa kayu balok, biasanya berjarak 1-1,5 meter. **Plesteran anyaman bambu/kawat** adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kawat dengan luas kurang lebih 1 meter persegi (m²) (1 meter x 1 meter) yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir. **Kayu/papan** adalah bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas lima tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang, atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Termasuk juga tripleks, Glass-fiber Reinforced Cement (GRC), dan Calciboard. **Batang kayu** adalah batang dari pohon langsung (masih bulat), tanpa dibelah terlebih dahulu. **Bambu/anyaman bambu**, Anyaman bambu merupakan bambu

yang diiris tipis-tipis kemudian dirajut seperti kain dan berbentuk lebar. Lainnya adalah jenis bahan bangunan seperti seng, kardus, dll.

j. Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas

Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer/granit, keramik/ubin/tegel/teraso, parket/vinil/karpet, kayu/papan, semen/bata merah, bambu/tanah, dan lainnya.

Marmer/granit. Marmer adalah batu gamping yang telah mengalami metamorfosis dan dapat dipakai untuk lantai, dinding, dll. Marmer biasa juga disebut batu pualam. Granit adalah batuan keras yang berwarna keputih-putihan, bila digunakan sebagai bahan lantai dapat bertahan lebih lama dari marmer atau keramik.

Keramik/ubin/tegel/teraso. Keramik adalah tanah liat yang dibakar dan dicampur dengan mineral lain. Tegel adalah ubin yang dibuat dari semen. Teraso adalah jenis lantai yang dibuat dari batu alam kecil-kecil, diaduk terlebih dahulu dengan adukan kapur pasir, dituang di atas dasar batu, lalu digiling.

Parket/vinil/karpet. Parket (*parquetted*) berarti menyusun potongan-potongan kayu untuk dijadikan penutup lantai. Vinil berbahan dasar campuran karet dan plastik, yang dilapisi dengan motif pada permukaannya. Karpet adalah bahan yang digunakan sebagai penutup lantai, biasanya terbuat dari benang tebal yang dirajut/dianyam. Dalam hal ini, karpet yang tidak mudah dilepas/dipindah. Tidak termasuk karpet yaitu lembaran plastik yang biasa dipasang di atas lantai berupa semen/tanah.

Kayu/sirap adalah lantai yang terbuat dari kayu/kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.

Semen/bata merah. Semen merujuk pada lantai yang terbuat dari adukan semen tambah pasir atau semen saja. Bata merah merujuk pada lantai yang tersusun dari bata merah.

Bambu/tanah. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru. Tanah adalah lantai langsung ke permukaan bumi tanpa ada alas lain di atasnya seperti pasir, tanah, atau batu.

Lainnya adalah jenis bahan bangunan selain yang disebutkan di atas.

k. Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Siapa Saja yang Menggunakan

Fasilitas tempat buang air besar adalah ketersediaan jamban/kloset yang dapat digunakan oleh rumah tangga responden.

Ada, digunakan hanya ART sendiri bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja. **Ada, digunakan bersama**

ART rumah tangga tertentu bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan digunakan oleh rumah tangga responden bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu.

Ada, di MCK komunal, Mandi Cuci Kakus (MCK) komunal merupakan fasilitas pengolahan air limbah domestik bersama di mana bangunan MCK berada di satu lokasi. MCK komunal melayani warga di suatu area permukiman, di mana warga yang tidak memiliki jamban di rumah masing-masing akan datang secara mandiri ke lokasi MCK. Bangunan bawah/unit pengolahan dari MCK komunal biasanya berupa tangki septik komunal ataupun IPAL komunal. Pengguna dari MCK komunal ini adalah kelompok rumah tangga tertentu yang berada dalam lokasi yang sama/berdekatan dan memiliki kepentingan yang sama. Kelompok rumah tangga ini biasanya membentuk suatu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah merencanakan, membangun, memanfaatkan, dan memelihara sarana komunal tersebut untuk kepentingan bersama.

Ada, di MCK umum/siapapun menggunakan bila rumah tangga menggunakan MCK yang merupakan salah satu sarana fasilitas umum yang bisa

digunakan oleh siapapun untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah. Contoh: MCK di terminal, MCK di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), MCK di tempat ibadah, dll.

Ada, ART tidak menggunakan bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar, tetapi tidak ada ART yang menggunakan. Penjelasan: 1. Termasuk ke dalam kode pilihan jawaban ini jika di rumah memiliki fasilitas tempat buang air besar, akan tetapi ART melakukan buang air besar sembarangan. 2. Tidak termasuk ke dalam kode pilihan jawaban ini jika di rumah memiliki fasilitas tempat buang air besar, akan tetapi ART melakukan buang air di fasilitas milik rumah tangga lain atau buang air besar di MCK komunal.

Tidak ada fasilitas bila rumah tangga responden tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar.

I. Jenis Kloset

Leher angsa adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

Plengsengan dengan tutup adalah kloset plengsengan yang ditutup bila tidak digunakan dan dibuka bila digunakan.

Plengsengan tanpa tutup adalah kloset plengsengan yang tidak menggunakan tutup.

Cemplung/cubluk adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran, sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhirnya.

m. Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Tangki septik. Tangki dengan dasar semen adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya juga bagian dasarnya. Beberapa jenis jamban/kakus yang disediakan di tempat umum/keramaian, seperti di taman kota, tempat penampungannya dapat berupa tong yang terbuat dari logam atau kayu. Tempat penampungan ini bisa dilepas untuk diangkut ke tempat pembuangan. Pada kasus tersebut, tempat pembuangan akhir dari jamban/kakus ini dianggap sebagai tangki dengan dasar semen. Tangki tanpa dasar semen adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya, kecuali bagian dasarnya.

IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan untuk aktivitas yang lain. Pada IPAL, air limbah rumah tangga tidak ditampung di dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa (dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi dua bagian, yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, dan laut). Termasuk di sini daerah permukiman yang mempunyai IPAL terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota.

Kolam/sawah/sungai/danau/laut, jika limbahnya dibuang ke kolam/sawah atau sungai/danau/laut.

Lubang tanah, jika limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).

Pantai/tanah lapang/kebun, jika limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun.

Lainnya, jika limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan.

n. Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum

Sumber air minum adalah sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika responden menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga. Jawaban:

Air kemasan bermerek adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (600 ml, 1,5 liter, 12 liter, atau 19 liter) dan kemasan gelas. Contohnya, air kemasan merek Aq**, Cl*b, V*T, L* M*n*r*I*.

Air isi ulang adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan biasanya tidak memiliki merek.

Leding meteran adalah air yang diproduksi melalui proses pengolahan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran tertutup/perpipaan sampai di rumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Air Minum, PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), UPT (Unit Pelaksana Teknis)/UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah), BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), Kelompok Masyarakat/KPSPAM (Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum), atau BUKS (Badan Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri).

Leding eceran adalah air yang diproduksi melalui proses pengolahan yang dikelola oleh BUMN, BUMD Air Minum, PAM, PDAM, UPT/UPTD, BUMDES, Kelompok Masyarakat/ KPSPAM, atau BUKS, di mana penyaluran ke konsumen dilakukan melalui pedagang air keliling/pikulan.

Sumur bor/pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).

Sumur terlindung adalah sumur galian bila lingkaran sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah, 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur/perigi.

Sumur tak terlindung adalah sumur yang tidak memenuhi syarat sebagai sumur terlindung.

Mata air terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai terlindung bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Mata air tak terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai tidak terlindung bila mata air tersebut tidak terlindung atau tercemar dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi) adalah apabila rumah tangga menggunakan air dari sungai, danau, waduk, kolam, irigasi sebagai sumber utama air minum.

Air hujan adalah apabila rumah tangga menggunakan air hujan sebagai sumber utama air minum.

Lainnya adalah sumber air utama yang digunakan untuk minum selain yang telah disebutkan, seperti air laut yang disuling.

o. Media Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mengakses Sumber Air Utama untuk Minum

Perpipaan meteran, bila air disalurkan menggunakan pipa dari sumber air sampai ke rumah dengan meter air.

Perpipaan tanpa meteran, bila air disalurkan menggunakan pipa dari sumber air sampai ke rumah tanpa meter air.

Hidran umum, bila air dialirkan kepada konsumen melalui jaringan perpipaan ke wadah komunal yang dapat melayani konsumen ± 100 jiwa atau 20 KK.

Keran umum, bila air dialirkan kepada konsumen melalui jaringan perpipaan yang dapat melayani konsumen ± 100 jiwa atau 20 KK dengan kapasitas minimum adalah 60 liter/orang/hari.

Terminal air, yaitu sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal oleh beberapa rumah tangga, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah dilengkapi dengan penyangga atau fondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari Mobil Tangki Air (MTA) atau kapal tangki air. Masyarakat mengambil air ke terminal air dengan menggunakan alat tampung seperti ember/jeriken.

Tidak ada, bila rumah tangga tidak menggunakan media perpipaan, hidran umum, keran umum, atau terminal air untuk mengakses sumber air. Termasuk kategori ini apabila rumah tangga menggunakan leding eceran.

Tidak tahu

p. Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat

Jarak yang dimaksud adalah jarak sumber air utama untuk minum ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat di lingkungan rumah tangga itu sendiri maupun rumah tangga lain.

q. Lokasi Sumber/Fasilitas Air Minum

Di rumah/kawasan dalam pagar rumah, lokasi sumber/fasilitas air minum terletak di dalam bangunan tempat tinggal, atau di depan, belakang atau samping rumah dan masih dalam satu pekarangan. Contohnya keran air yang letaknya di dalam rumah, sumur yang letaknya di halaman rumah, mengambil air kemasan bermerek (misal berupa air galon) dari toko di rumah sendiri, dll.

Di luar kawasan pagar rumah, lokasi sumber/fasilitas air minum terletak di luar batas pekarangan rumah, misal: membeli air isi ulang di toko di luar rumah, membeli air isi ulang dari pedagang keliling dan tidak tahu lokasi/sumber air minum tersebut, air danau, dll.

r. Lama Waktu yang Dibutuhkan untuk Mengambil Air ke Sumber/Fasilitas Air Sampai Kembali Lagi ke Rumah

Waktu yang biasanya digunakan untuk mengambil air minum pulang pergi, baik menggunakan alat transportasi maupun tidak. Dalam hal ini termasuk waktu menunggu atau antre. Jika dalam satu hari pengambilan air dilakukan beberapa kali, maka waktu yang dicatat adalah waktu untuk satu kali pengambilan air. Satuan waktu yang digunakan adalah dalam satuan menit. Jika responden “tidak tahu”, kosongkan kotak yang tersedia dan lingkari kode 998.

s. Kekurangan Air Minum untuk Kebutuhan Rumah Tangga

Kekurangan air minum yang dimaksud terkait dengan akses rumah tangga terhadap air minum. Jika rumah tangga mengalami kekurangan air minum untuk kebutuhan rumah tangga selama minimal 24 jam berturut-turut dalam setahun terakhir, tetapi masih bisa mendapatkan air minum dari tetangga, maka tidak dikategorikan kekurangan air minum.

t. Kondisi Fisik Sumber Air Utama untuk Minum

Keruh, jika air minum keruh, tidak jernih/tidak bening.

Berwarna, jika air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, kecoklatan atau warna lainnya.

Berasa, jika air minum terasa asam, manis, pahit, atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air.

Berbusa, jika air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak.

Berbau, jika air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air.

u. Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci

Penjelasan mengenai sumber air utama sama dengan penjelasan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum

v. Keterangan Keberadaan Listrik

Listrik PLN dengan meteran, jika sumber penerangan listrik dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan menggunakan meteran (volumetrik).

Listrik PLN tanpa meteran, jika sumber penerangan listrik, sumber listriknya mengambil dari rumah/bangunan lain, tiang listrik tanpa melalui meteran, atau listrik yang disalurkan dari listrik tetangga.

Listrik non-PLN, jika sumber penerangan listrik dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN, termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (tidak dikelola oleh PLN).

Bukan listrik, jika sumber penerangan listrik berupa petromak, aladin, pelita, sentir, obor, lilin, karbit, biji jarak, kemiri, dan lain-lain.

w. Akses Terhadap Air Minum Layak

Akses terhadap air minum layak adalah rumah tangga dengan dari sumber air minum dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan. Khusus rumah tangga dengan air minum dari air kemasan bermerk dan air isi ulang, jika:

- Air mandi, cuci, dll dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, maka dinyatakan akses air layak,

- Air mandi, cuci, dll dari sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, air permukaan, dan lainnya, maka dinyatakan akses air tidak layak.

Selain akses air minum kayak, terdapat ukuran air minum aman, air minum bukan dari air permukaan, dan air minum layak dasar.

Air Minum Aman, air yang memenuhi sejumlah kriteria penting untuk menjamin kesehatan dan kenyamanan rumah tangga. Komponen penghitungan air minum aman mencakup: pertama, sumber air minum layak, yaitu air yang berasal dari leding, sumur bor atau pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, air kemasan bermerk, atau air isi ulang. Kedua, keterjangkauan, yaitu lokasi sumber air harus berada di dalam rumah atau setidaknya di dalam kawasan berpagar rumah. Ketiga, kontinuitas, di mana rumah tangga tidak mengalami kekurangan air minum selama paling sedikit 24 jam terakhir. Terakhir, kualitas air, yang ditentukan berdasarkan kondisi fisik: tidak keruh, tidak berbusa, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau.

Air Minum Layak Dasar, menggambarkan akses rumah tangga menggunakan sumber air minum layak dan waktu untuk mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum (pulang pergi, termasuk waktu antri) kurang dari atau sama dengan ($\leq$) 30 menit.

Air Minum Bukan Air Permukaan, menggambarkan akses rumah tangga yang menggunakan sumber air yang bukan berasal dari air permukaan. Air permukaan adalah air tawar yang terdapat pada permukaan tanah yang dapat berupa sungai, danau, waduk, kolam, irigasi, dll.

x. Sanitasi Layak

Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Fasilitas sanitasi diklasifikasikan layak jika rumah tangga memiliki dan menggunakan fasilitas tempat BAB yang digunakan oleh ART sendiri, bersama dengan rumah tangga tertentu, atau menggunakan MCK komunal. Kriteria selanjutnya adalah jenis kloset yang

digunakan berupa leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangka septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL).

y. Ketahanan Bangunan (Durability of Housing)

Rumah memiliki daya tahan (*durability of housing*) jika jenis atap terluas berupa beton, genteng, seng, dan kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, anyaman bambu, dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegél/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah.

z. Indikator Rumah Tidak Layak Huni

Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar minimum untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kelayakan hidup penghuninya. Menurut regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta kriteria dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, rumah layak huni setidaknya harus memenuhi empat komponen utama berikut:

- 1) Ketahanan bangunan: Rumah dibangun dengan struktur yang kokoh dan menggunakan material yang memenuhi standar, seperti atap bukan dari asbes, dinding permanen, dan lantai yang kuat serta bersih.
- 2) Luas lantai per kapita: Luas lantai minimal 7,2 meter persegi per orang, agar penghuni tidak mengalami kepadatan berlebih dalam satu ruangan.
- 3) Akses terhadap air minum layak: Rumah tangga harus memiliki akses ke sumber air bersih dan aman, seperti sumur bor terlindung, leding, atau air isi ulang yang sesuai standar kualitas fisik.
- 4) Akses terhadap sanitasi layak: Rumah harus dilengkapi fasilitas buang air besar yang sehat, seperti kloset leher angsa dan sistem pembuangan yang tertutup (septic tank, IPAL, atau lubang tanah di pedesaan).

Jika salah satu dari keempat aspek tersebut tidak terpenuhi, maka rumah tersebut dikategorikan sebagai tidak layak huni. Rumah layak huni bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga mencerminkan hak dasar setiap warga negara atas tempat tinggal yang aman dan sehat.

Keterangan Lansia

Lansia didefinisikan sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Keterangan Putus Sekolah

Putus sekolah didefinisikan sebagai anak usia sekolah, yaitu usia 7-18 tahun, yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Anggota Keluarga yang Mengusahakan Pertanian

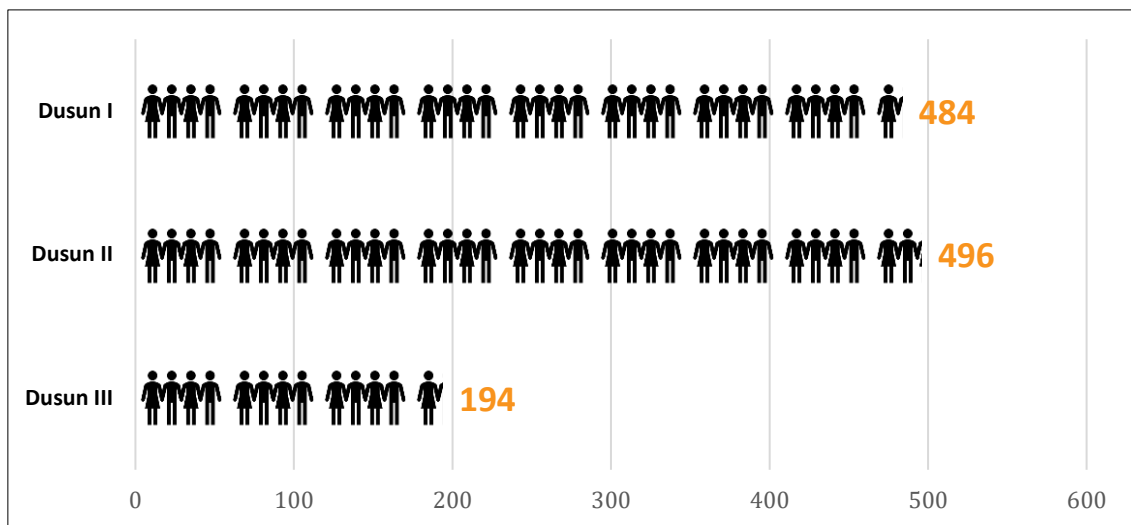
Anggota keluarga yang mengusahakan pertanian adalah anggota keluarga yang memelihara/mengusai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan.

BAB III HASIL PAKSIAN BIKANG

3.1. KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL

3.1.1. Jumlah Penduduk di Desa Bikang Tahun 2026

Total jumlah penduduk di Desa Bikang pada tahun 2026 mencapai 1.174 jiwa (total keseluruhan dari tiga dusun), dengan sebaran demografis yang memperlihatkan konsentrasi massa yang cukup kontras antar wilayah. Dusun II (dengan 3 RT) mencatatkan jumlah penduduk tertinggi mendominasi dengan 496 jiwa, diikuti oleh Dusun I (dengan 3 RT) yang dihuni oleh 484 jiwa. Sementara, Dusun III (dengan 1 RT) menjadi dusun dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 194 jiwa.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 1. Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Dusun, 2026

Distribusi ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk cenderung jauh lebih tinggi di wilayah Dusun I dan Dusun II. Perbedaan jumlah penduduk dan cakupan wilayah antar dusun ini penting untuk diperhatikan dalam menyusun kebijakan pembangunan desa, agar pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan,

dan kesehatan dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah. Besarnya konsentrasi penduduk di dusun-dusun tertentu menuntut prioritas alokasi sarana publik yang lebih proporsional, sementara dusun dengan populasi yang lebih kecil tetap memerlukan strategi pendekatan pelayanan yang merata dan menjangkau seluruh warga.

3.1.2. Jumlah Keluarga di Desa Bikang Tahun 2026

Keluarga merupakan satuan hubungan yang terbentuk melalui ikatan perkawinan, baik pasangan yang masih berstatus menikah maupun yang telah bercerai. Anggota keluarga dapat mencakup ayah, ibu, dan anak; hanya ayah dan ibu; ayah dengan anak;



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 2. Jumlah Keluarga di Desa Bikang Menurut Dusun, 2026

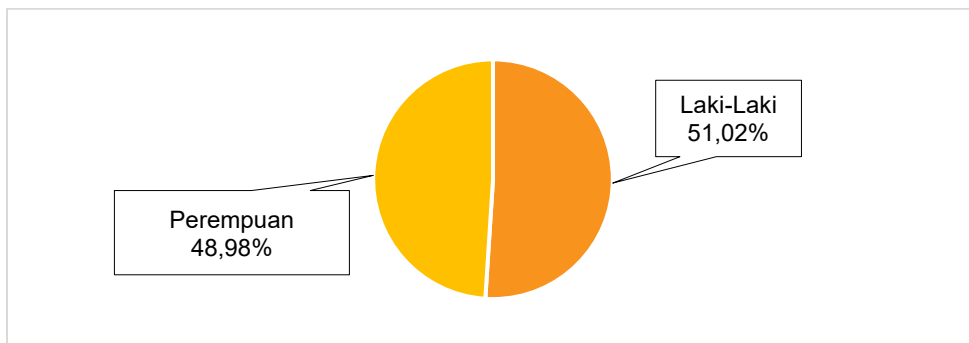
Total jumlah keluarga di Desa Bikang pada tahun 2026 mencapai 366 keluarga (total keseluruhan dari tiga dusun), dengan sebaran yang menunjukkan pola konsentrasi wilayah yang sejalan dengan jumlah penduduknya. Dusun II (dengan 3 RT) mencatatkan jumlah keluarga terbanyak yaitu 160 keluarga, disusul oleh Dusun

I (dengan 3 RT) yang dihuni oleh 146 keluarga. Sementara itu, Dusun III (dengan 1 RT) mencatatkan sebanyak 60 keluarga.

Distribusi ini menunjukkan bahwa konsentrasi keluarga berpusat di wilayah Dusun I dan Dusun II, yang selaras dengan cakupan wilayah administratif (jumlah RT) yang lebih luas. Perbedaan jumlah keluarga dan wilayah administratif antar dusun ini menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan dan intervensi program desa—seperti penyaluran bantuan sosial, pengelolaan sampah rumah tangga, hingga pendataan administrasi kependudukan. Dusun dengan tingkat kepadatan keluarga yang tinggi memerlukan efisiensi tata kelola pelayanan publik, sedangkan dusun dengan jumlah keluarga yang lebih sedikit tetap membutuhkan keterjangkauan akses program secara merata.

3.1.3. Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin

Berdasarkan data pendataan Paksian Bikang Tahun 2026, jumlah penduduk di Desa Bikang secara keseluruhan tercatat sebanyak 1.174 jiwa. Struktur populasi masyarakat di desa ini didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 599 jiwa atau berkontribusi sebesar 51,02% dari total populasi. Sementara itu, jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan tercatat sebanyak 575 jiwa, yang menyumbang sekitar 48,98% dari keseluruhan penduduk desa.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 3. Persentase Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2026

Berdasarkan perbandingan komposisi tersebut, diperoleh nilai **Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Desa Bikang sebesar 104,17**. Angka ini mengindikasikan bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan di Desa Bikang, terdapat sekitar 104 penduduk laki-laki. Dominasi populasi laki-laki dengan angka *sex ratio* di atas 100 ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari dinamika angka kelahiran alamiah hingga karakteristik mobilitas tenaga kerja lokal di wilayah perdesaan. Informasi mengenai keseimbangan komposisi gender ini menjadi landasan penting bagi Pemerintah Desa Bikang dalam menyusun program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih proporsional serta responsif gender di masa mendatang.

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis kelamin dan Dusun Tahun 2026

Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dusun I	248	236	484	105,08
Dusun II	254	242	496	104,96
Dusun III	97	97	194	100,00
Total	599	575	1174	104,17

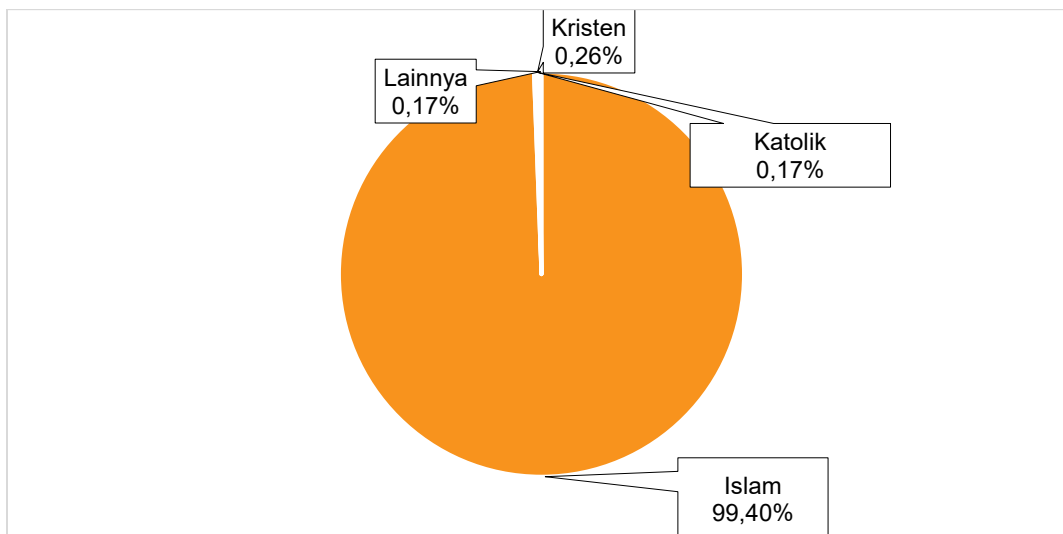
Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Berdasarkan pendataan Paksian Bikang Tahun 2026, distribusi penduduk menurut jenis kelamin terbagi ke dalam empat wilayah dusun dengan tingkat kepadatan yang bervariasi. Dusun II menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Desa Bikang, yakni mencatatkan total 496 jiwa yang terdiri atas 254 jiwa laki-laki dan 242 jiwa perempuan, dengan nilai Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) sebesar 104,96. Selanjutnya, Dusun I menempati posisi kedua terbanyak dengan total 484 jiwa, terdiri dari 248 jiwa laki-laki dan 236 jiwa perempuan, yang menghasilkan angka *sex ratio* sebesar 105,08.

Sementara itu, Dusun III mencatatkan total penduduk sebanyak 194 jiwa yang terbagi atas 97 jiwa laki-laki dan 97 jiwa perempuan, sehingga diperoleh nilai *sex ratio* sebesar 100. Angka ini menunjukkan bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan di Desa Bikang, terdapat juga sekitar 100 penduduk laki-laki di Dusun III.

Secara keseluruhan, seluruh wilayah dusun di Desa Bikang memperlihatkan tren yang konsisten, di mana jumlah penduduk laki-laki senantiasa lebih dominan dibandingkan penduduk perempuan (*sex ratio* > 100). Ketimpangan rasio gender yang paling mencolok terlihat di Dusun I dan II, yang dimungkinkan terjadi akibat tingginya konsentrasi tenaga kerja laki-laki atau pola migrasi lokal. Pemetaan ketimpangan jumlah penduduk dan rasio gender antar-dusun ini menjadi data krusial bagi pemerintah desa dalam merencanakan alokasi fasilitas publik, layanan kesehatan masyarakat, serta program pemberdayaan ekonomi yang tepat sasaran di tiap-tiap wilayah.

3.1.4. Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Agama



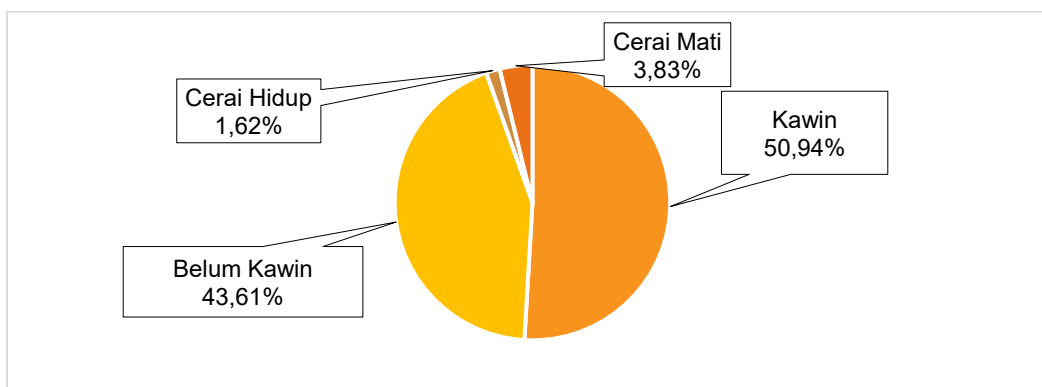
Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 4. Persentase Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Agama Tahun 2026

Berdasarkan hasil pendataan Paksian Bikang Tahun 2026, jumlah penduduk di Desa Bikang secara keseluruhan tercatat sebanyak 1.174 jiwa yang terdistribusi ke dalam beberapa penganut keagamaan dan kepercayaan. Komposisi penduduk Desa Bikang sangat didominasi oleh penganut agama Islam, yaitu sebanyak 1.167 jiwa atau menyumbang sekitar 99,40% dari total populasi desa. Keterpusatan populasi pada satu agama mayoritas ini mencerminkan identitas sosial dan kebudayaan lokal masyarakat desa yang didasari oleh nilai-nilai keislaman yang kuat.

Selain keberadaan kelompok mayoritas, Desa Bikang juga memiliki keberagaman struktur keagamaan minoritas yang cukup dinamis. Penganut agama Kristen menjadi kelompok terbesar kedua dengan jumlah 3 jiwa atau sebesar 0,26%, disusul oleh penganut agama Katolik dan kepercayaan Lainnya sebanyak masing-masing 2 jiwa atau sebesar 0,17% dari total populasi. Keberadaan variasi penganut agama yang hidup berdampingan secara harmonis ini menunjukkan tingginya tingkat toleransi sosial di Desa Bikang, yang dapat menjadi modal sosial penting bagi Pemerintah Desa dalam menjaga stabilitas serta keharmonisan antarumat beragama.

3.1.5. Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Status Perkawinan

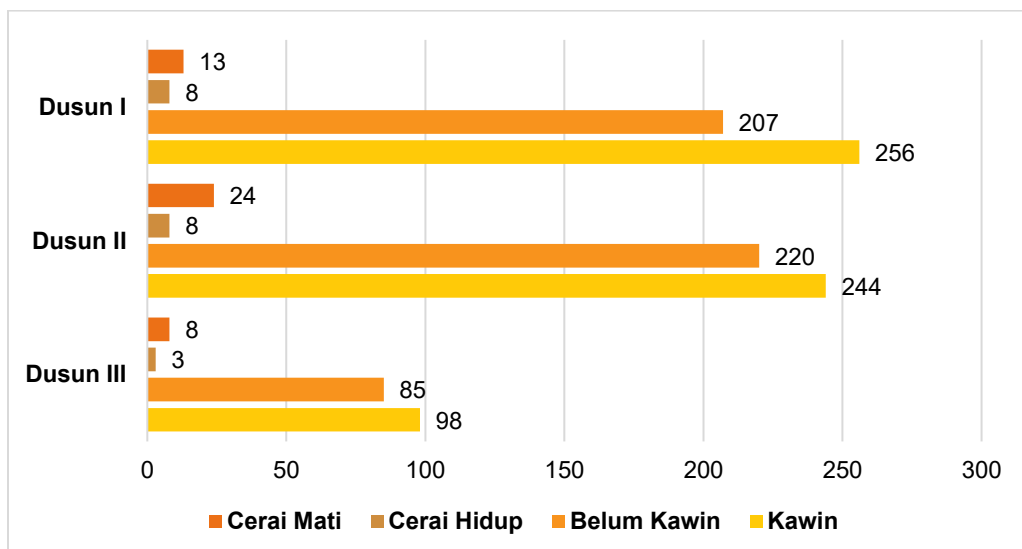


Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 5. Persentase Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Status Perkawinan Tahun 2026

Berdasarkan hasil pendataan Paksian Bikang Tahun 2026, distribusi penduduk Desa Bikang berdasarkan status perkawinan mencakup total 1.174 jiwa. Struktur status pernikahan di desa ini didominasi oleh kelompok penduduk yang berstatus kawin, yaitu mencapai 598 jiwa atau menyumbang sekitar 50,94% dari total populasi. Tingginya proporsi penduduk berstatus kawin mencerminkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Bikang telah berada pada tahap kehidupan berumah tangga.

Sementara itu, kelompok penduduk dengan status belum kawin menempati posisi terbesar kedua, yaitu sebanyak 512 jiwa atau berkontribusi sebesar 43,61% dari total masyarakat. Adapun kelompok penduduk dengan status perkawinan berakhir tercatat dalam proporsi yang relatif kecil, di mana penduduk dengan status cerai mati sebanyak 45 jiwa (3,83%) dan status cerai hidup sebanyak 19 jiwa (1,62%). Gambaran komposisi status perkawinan ini mencerminkan struktur demografi yang cukup seimbang antara kelompok usia muda dan kelompok keluarga matang, yang menjadi modal penting bagi perencanaan program sosial, pemberdayaan keluarga, serta ketahanan sosial masyarakat di Desa Bikang.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

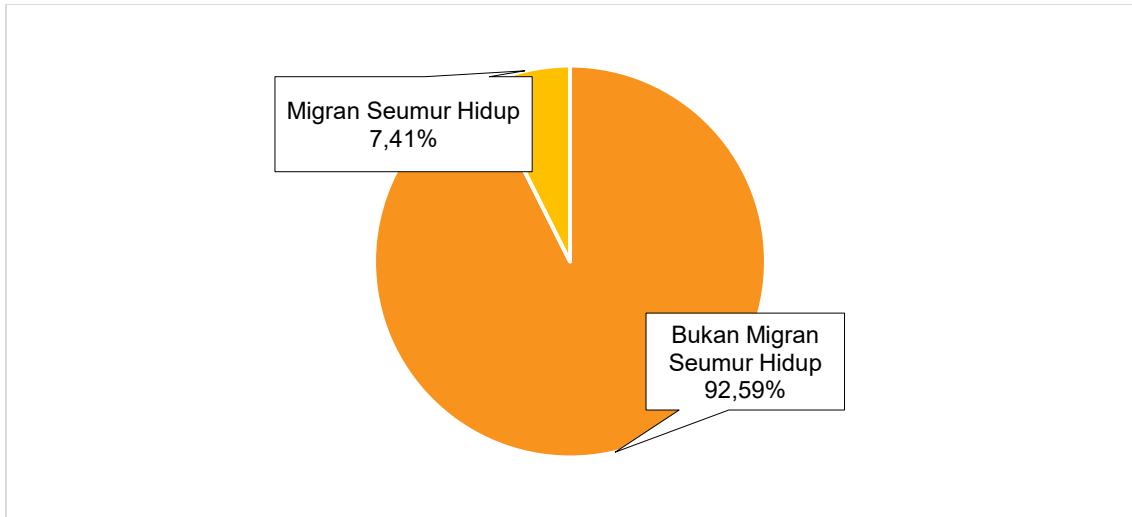
Gambar 6. Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Status Perkawinan dan Dusun Tahun 2026

Berdasarkan hasil pendataan Paksian Bikang Tahun 2026, distribusi status perkawinan di tingkat dusun memperlihatkan karakteristik demografi keluarga yang cukup bervariasi. Dusun Dusun I mencatatkan populasi berstatus kawin tertinggi di Desa Bikang, yaitu sebanyak 256 jiwa, berbanding dengan 207 jiwa penduduk yang belum kawin, serta memiliki 8 jiwa berstatus cerai hidup dan 13 jiwa cerai mati dari total 484 jiwa penduduknya. Sebaliknya, di Dusun II, kelompok penduduk yang berstatus kawin (244 jiwa) dan belum kawin (220 jiwa) berada pada proporsi yang hampir seimbang, dipadukan dengan 8 jiwa berstatus cerai hidup dan 24 jiwa cerai mati dari total 496 jiwa penduduk.

Dusun III juga menunjukkan proporsi penduduk status kawin (98 jiwa) dan belum kawin (85 jiwa) yang hampir seimbang, dengan penduduk berstatus cerai hidup sebanyak 3 jiwa dan berstatus cerai mati sebanyak 8 jiwa. Gambaran perbedaan dinamika keluarga antar-dusun ini penting sebagai pijakan Pemerintah Desa Bikang dalam merumuskan kebijakan berbasis ketahanan keluarga, alokasi bantuan sosial, serta pendampingan kesejahteraan masyarakat yang lebih tepat sasaran di tiap wilayah.

3.1.6. Keterangan Migrasi Seumur Hidup Penduduk di Desa Bikang

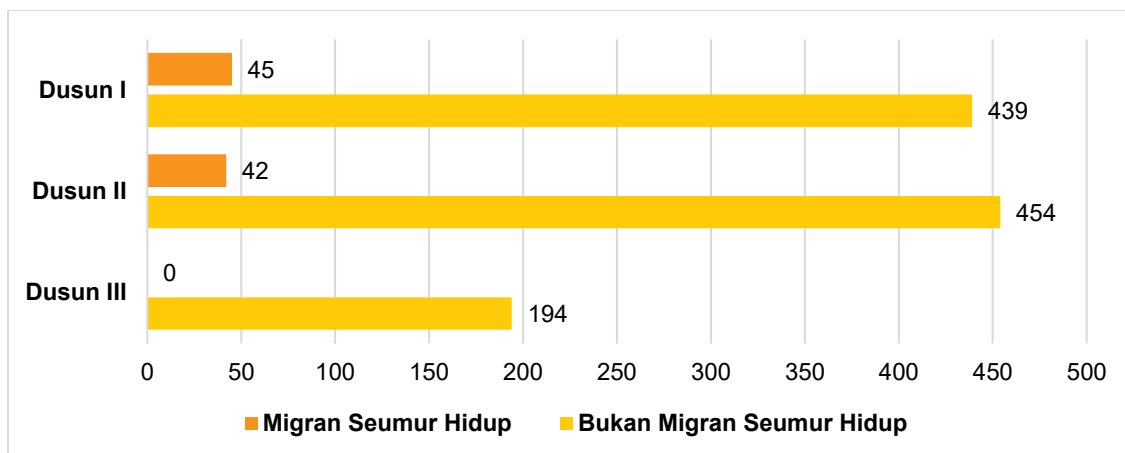
Berdasarkan hasil pendataan Paksian Bikang Tahun 2026, komposisi penduduk di Desa Bikang berdasarkan tempat kelahiran (status migrasi seumur hidup) mencakup total 1.174 jiwa. Mayoritas masyarakat Desa Bikang merupakan penduduk lokal atau kelompok bukan migran seumur hidup, yaitu sebanyak 1.087 jiwa atau berkontribusi sebesar 92,59% dari keseluruhan populasi desa. Tinggi dan dominannya proporsi penduduk lokal ini mencerminkan keterikatan sosial serta kestabilan demografi masyarakat asli yang telah menetap dan lahir di wilayah Desa Bikang secara turun-temurun.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 7. Persentase Migrasi Seumur Hidup di Desa Bikang Tahun 2026

Sementara itu, kelompok penduduk migran seumur hidup (penduduk yang lahir di luar Desa Bikang) mencatatkan proporsi sebanyak 87 jiwa atau hanya sekitar 7,41% dari total populasi. Persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Bikang merupakan penduduk asli yang lahir dan tumbuh di wilayah tersebut, sedangkan kontribusi penduduk pendatang relatif terbatas. Keberadaan migran seumur hidup dalam jumlah yang kecil menggambarkan bahwa mobilitas masuk penduduk dari luar desa tidak menjadi faktor utama dalam pertumbuhan penduduk Desa Bikang. Meskipun demikian, kelompok migran ini tetap memiliki peran dalam dinamika sosial masyarakat, baik melalui hubungan keluarga, aktivitas ekonomi, maupun keterlibatan dalam kehidupan sosial dan pembangunan desa.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 8. Jumlah Penduduk di Desa Bikang Menurut Keterangan Migrasi Seumur Hidup dan Dusun Tahun 2026

Berdasarkan hasil pendataan Paksian Bikang Tahun 2026, pola penyebaran penduduk menurut tempat kelahiran di tingkat dusun menunjukkan karakteristik daya tarik wilayah yang bervariasi. Dusun I dan Dusun II menjadi wilayah dengan konsentrasi penduduk migran seumur hidup yang hampir sama. Konsentrasi paling tinggi terdapat di Dusun II, yaitu mencapai 45 jiwa (91,53% dari total 496 jiwa penduduk di dusun tersebut). Kemudian, penduduk migran seumur hidup di Dusun I mencapai 42 jiwa (90,70% dari total 484 jiwa) berbanding dengan 439 jiwa penduduk bukan migran. Tingginya proporsi migran di Dusun I dan Dusun II mengindikasikan wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal atau pusat permukiman baru yang paling banyak diminati oleh penduduk pendatang dari luar desa.

Sementara itu, Dusun III tidak terdapat penduduk migran seumur hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh penduduk di Dusun III merupakan penduduk yang lahir di Desa Bikang atau bukan termasuk kategori migran seumur hidup. Tidak ditemukannya penduduk migran di wilayah ini dapat mengindikasikan bahwa Dusun III memiliki tingkat mobilitas masuk penduduk yang relatif rendah dibandingkan dengan Dusun I dan Dusun II. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh

faktor lokasi, perkembangan permukiman, akses terhadap fasilitas, maupun aktivitas ekonomi yang belum menjadi daya tarik utama bagi penduduk dari luar desa. Meskipun demikian, kondisi ini juga menunjukkan adanya karakteristik sosial masyarakat yang lebih homogen dengan dominasi penduduk lokal yang telah lama menetap di wilayah tersebut.

3.1.7. Keterangan Lansia di Desa Bikang



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 9. Persentase Rumah Tangga yang Tercatat Memiliki Penduduk Lansia di Desa Bikang, 2026

Berdasarkan hasil pendataan Paksian Bikang Tahun 2026, kondisi kesejahteraan sosial dan struktur keluarga di wilayah ini mencatatkan bahwa sebanyak 8,5% rumah tangga di Desa Bikang memiliki anggota keluarga lanjut usia (lansia) yang tinggal di dalamnya. Keberadaan lansia dalam struktur rumah tangga ini mencerminkan tingginya nilai-nilai kekeluargaan dan ikatan antar-generasi yang masih terjaga erat di tengah masyarakat desa, di mana lansia umumnya tinggal bersama anak atau anggota keluarga inti lainnya.

Secara demografi dan pelayanan publik, proporsi rumah tangga dengan lansia yang mencapai lebih dari seperenam total rumah tangga desa ini memberikan

gambaran krusial terkait arah kebijakan perlindungan sosial di tingkat lokal. Keberadaan kelompok lansia memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Desa Bikang, terutama dalam hal kemudahan akses terhadap layanan kesehatan dasar, program posyandu lansia, jaminan sosial kependudukan, serta penyediaan fasilitas lingkungan pemukiman yang ramah dan inklusif bagi kelompok rentan.

3.1.8. Keterangan Anak Putus Sekolah di Desa Bikang

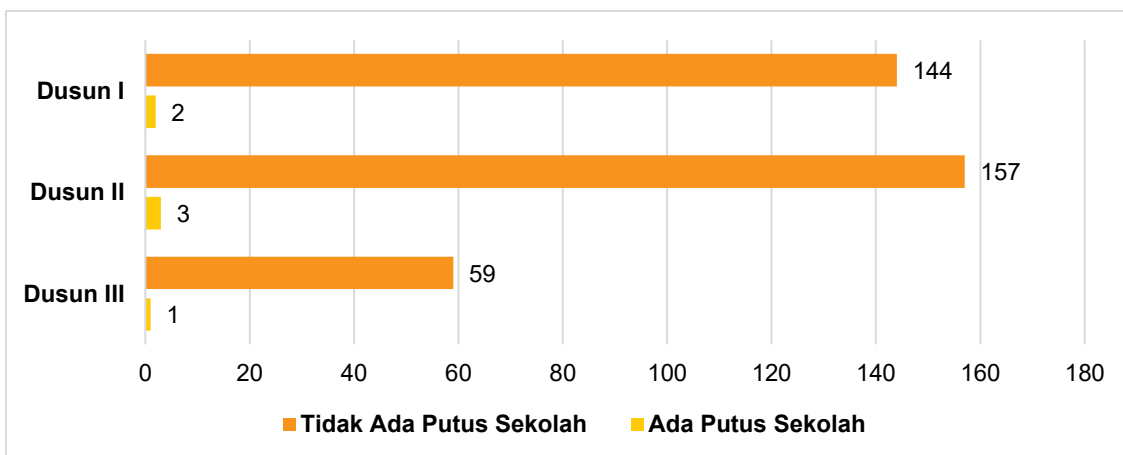


Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 10. Persentase Rumah Tangga yang Tercatat Memiliki Anak Putus Sekolah di Desa Bikang, 2026

Berdasarkan hasil pendataan Paksian Bikang Tahun 2026, aspek pemenuhan hak pendidikan dasar dan menengah mencatatkan bahwa terdapat sebanyak 0,51% rumah tangga di Desa Bikang yang memiliki anggota anak dalam kondisi putus sekolah. Angka ini secara umum mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi pendidikan di Desa Bikang sudah tergolong cukup baik karena mayoritas besar rumah tangga mampu menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka. Meski demikian, keberadaan rentang 0,51% rumah tangga yang masih dihadapkan pada permasalahan anak putus sekolah ini tetap menjadi perhatian sosial yang penting di tingkat desa.

Fenomena anak putus sekolah di tingkat rumah tangga ini umumnya dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor kompleks, mulai dari keterbatasan kondisi ekonomi keluarga, dorongan untuk membantu mata pencaharian orang tua, hingga kurangnya motivasi atau kendala aksesibilitas menuju sarana pendidikan. Adanya indikator ini menjadi sinyal krusial bagi Pemerintah Desa Bikang serta pemangku kepentingan terkait untuk melakukan intervensi kebijakan sosial yang tepat sasaran, seperti pemberian beasiswa/bantuan pendidikan, pendampingan minat belajar, maupun penguatan program keahlian vokasi agar anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang setara demi masa depan desa yang lebih cerdas dan sejahtera.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

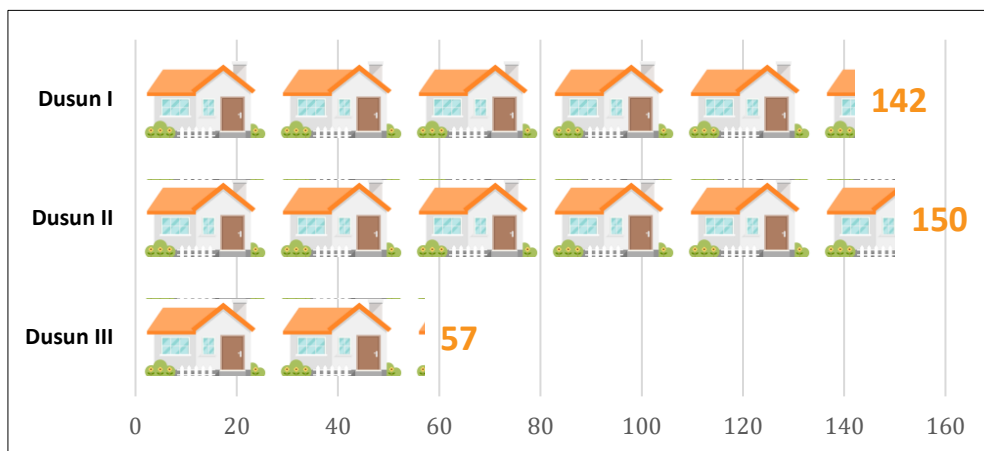
Gambar 11. Jumlah Rumah Tangga yang Tercatat Memiliki Anak Putus Sekolah di Desa Bikang Menurut Dusun Tahun 2026

Berdasarkan hasil pendataan Paksian Bikang Tahun 2026, distribusi rumah tangga yang memiliki anggota anak putus sekolah memperlihatkan variasi yang hampir sama antar-wilayah dusun. Dusun II mencatatkan jumlah rumah tangga dengan anak putus sekolah tertinggi di Desa Bikang, yaitu sebanyak 3 rumah tangga atau menyumbang sekitar 1,88% dari total 160 rumah tangga di wilayah tersebut, berbanding 157 rumah tangga yang tidak memiliki anak putus sekolah. Sementara itu, Dusun I menempati posisi kedua dengan 2 rumah tangga (1,37% dari total 146

rumah tangga) yang tercatat memiliki anak putus sekolah. Kemudian, Dusun III memiliki penduduk anggota anak putus sekolah paling sedikit, yaitu sebanyak 1 orang atau sekitar 1,67% dari total 60 rumah tangga di Dusun III. Pemetaan angka partisipasi pendidikan di tingkat dusun ini memberikan dasar evaluasi yang konkret bagi Pemerintah Desa Bikang untuk memfokuskan program pendampingan, alokasi bantuan biaya pendidikan, dan intervensi sosial secara terarah, khususnya bagi wilayah Dusun Dusun II dan Air Bulang.

3.2. HUNIAN

3.3.1. Jumlah Bumbung Rumah Tempat Tinggal



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 12. Jumlah Bumbung Rumah di Desa Bikang Menurut Dusun, 2026

Total jumlah rumah tempat tinggal (bumbung) di Desa Bikang pada tahun 2026 mencapai 349 unit (total keseluruhan dari tiga dusun), dengan sebaran fisik pemukiman yang sejalan dengan tingkat kepadatan penduduknya. Dusun II (dengan 3 RT) mencatatkan jumlah rumah tempat tinggal terbanyak yaitu 150 unit, disusul oleh Dusun I (dengan 3 RT) yang memiliki 142 unit rumah. Sementara itu, Dusun III (dengan 1 RT) mencatatkan rumah tempat tinggal (bumbung) paling sedikit, yakni sebanyak 57 unit.

Jika dikorelasikan dengan data demografi lainnya seperti jumlah keluarga, pola sebaran ini memberikan sudut pandang baru yang lebih berimbang mengenai tingkat kepadatan hunian. Di Dusun II, dengan total 160 keluarga dan ketersediaan 150 unit rumah, rasio hunian relatif mendekati proporsi ideal meskipun masih terdapat sedikit selisih yang menunjukkan adanya beberapa keluarga yang tinggal bersama. Kondisi yang sama juga ditunjukkan di Dusun I dan Dusun III, dimana di Dusun I terdapat 146 keluarga dengan 142 unit rumah serta Dusun III terdapat 60 keluarga dengan 57 unit rumah.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan hunian di kedua dusun tersebut relatif terpenuhi, meskipun masih terdapat perbedaan jumlah antara keluarga dan unit rumah. Selisih yang relatif kecil ini menggambarkan bahwa tingkat kepadatan hunian di Desa Bikang masih berada pada kondisi yang cukup terkendali, dengan sebagian besar keluarga telah memiliki akses terhadap tempat tinggal. Namun, tetap diperlukan perhatian terhadap ketersediaan hunian di masa mendatang seiring dengan pertumbuhan jumlah keluarga dan perubahan struktur demografi masyarakat.

3.3.2. Keluarga yang Tinggal dalam Satu Bangunan Tempat Tinggal

Umumnya, satu keluarga menempati satu rumah atau bangunan sensus, namun karena alasan ekonomi atau faktor lainnya, tidak menutup kemungkinan satu rumah dihuni oleh lebih dari satu keluarga.



**Rata-Rata Jumlah Keluarga
dalam Satu Bangunan**

1,05



**Rata-Rata Jumlah
Penghuni Rumah**

3,36

Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 13. Rata-Rata Jumlah Keluarga dalam Satu Bangunan dan Rata-Rata Jumlah Penghuni Rumah di Desa Bikang, 2026

Rata-rata jumlah keluarga dalam satu bangunan di Desa Bikang adalah 1,05, sementara rata-rata jumlah penghuni rumah adalah 3,36 orang. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah dihuni oleh satu keluarga, namun terdapat sejumlah rumah yang dihuni oleh lebih dari satu keluarga, yang mendorong angka rata-rata menjadi sedikit di atas satu. Hal ini bisa terjadi karena adanya praktik tinggal bersama antar keluarga, seperti orang tua dan anak yang sudah menikah namun belum memiliki rumah sendiri, atau keluarga yang tinggal bersama sanak saudara untuk alasan ekonomi.

Rata-rata jumlah penghuni rumah di Desa Bikang adalah 3,36 orang per rumah, yang mencerminkan bahwa sebagian besar rumah dihuni oleh keluarga inti berukuran sedang, biasanya terdiri dari orang tua dan dua anak, atau mungkin juga mencakup kakek/nenek atau anggota keluarga lain dalam satu atap. Meskipun angka ini tidak tergolong tinggi, namun tetap perlu diperhatikan karena rata-rata ini tidak mencerminkan variasi yang mungkin ada di lapangan, seperti rumah dengan anggota

keluarga lebih dari lima orang atau bahkan rumah yang dihuni bersama oleh dua keluarga besar.

3.3.3. Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal sering kali dikaitkan dengan istilah *backlog*. Data *backlog* dalam sektor perumahan dapat dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu tingkat hunian dan kepemilikan bangunan tempat tinggal. Apabila sumber data berasal dari BPS, maka *backlog* dihitung berdasarkan status kepemilikan tempat tinggal, bukan dari aspek tingkat huniannya. *Backlog* sendiri merupakan salah satu indikator penting yang digunakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan perumahan, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan strategis seperti Renstra dan RPJMN. Indikator ini berfungsi untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah yang belum terpenuhi bagi penduduk di seluruh Indonesia.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 14. Persentase Bangunan di Desa Bikang Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2026

Jika ditinjau dari pendekatan kepemilikan tempat tinggal tersebut, Desa Bikang menunjukkan angka *backlog* yang relatif rendah. Dari total 349 unit rumah tempat tinggal, sebanyak 291 unit (83,38%) telah berstatus Milik Sendiri. Sementara itu, potensi angka *backlog* kepemilikan rumah di Desa Bikang tercatat sebesar 16,62% atau sebanyak 58 unit, yang terdiri dari rumah berstatus Bebas Sewa sebanyak 54 unit (15,47%) dan Kontrak/Sewa sebanyak 4 unit (1,15%).

Rendahnya persentase *backlog* kepemilikan ini menandakan bahwa tingkat ketersediaan rumah milik pribadi di Desa Bikang sudah sangat memadai. Namun demikian, data *backlog* berbasis kepemilikan ini memberikan pijakan konkret bagi Pemerintah Desa dan Daerah untuk memprioritaskan intervensi program perumahan secara tepat sasaran, khususnya bagi 97 rumah tangga yang masih menempati hunian sewa atau menumpang, agar kebutuhan dasar akan kepemilikan rumah yang layak dapat terpenuhi secara bertahap.

Tabel 2. Jumlah Bumbung Bangunan Tempat Tinggal Berdasarkan Dusun dan Status Kepemilikan di Desa Bikang, 2026

Dusun	Status Kepemilikan	Jumlah Bangunan
(1)	(2)	134
Dusun I	Milik Sendiri	134
	Bukan Milik Sendiri	8
Dusun II	Milik Sendiri	113
	Bukan Milik Sendiri	37
Dusun III	Milik Sendiri	44
	Bukan Milik Sendiri	13

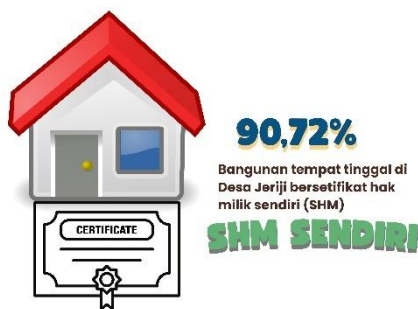
Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Dusun Dusun I mencatatkan jumlah hunian milik sendiri terbanyak yaitu 134 unit (94,37%), sementara bangunan berstatus Bukan Milik Sendiri (kontrak/sewa maupun bebas sewa) di wilayah ini berjumlah 8 unit (5,63%) menjadikannya sebagai

wilayah dengan persentase kepemilikan rumah pribadi tertinggi di Desa Bikang. Selanjutnya, Dusun II memiliki 113 unit (75,33%) rumah berstatus milik sendiri dan hanya 16 unit (24,67%) berstatus bukan milik sendiri. Adapun di Dusun III, terdapat 44 unit (77,19%) rumah milik sendiri dengan 13 unit (22,81%) bukan milik sendiri.

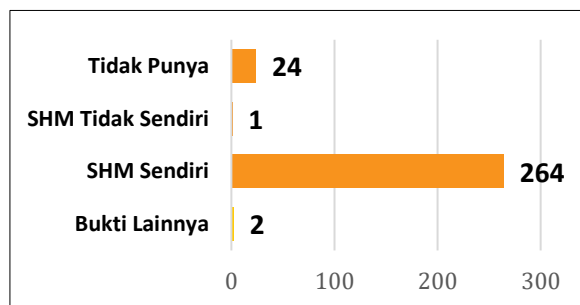
Ditinjau dari pendekatan BPS mengenai *backlog* perumahan berbasis status kepemilikan, data antar dusun ini memberikan gambaran yang presisi mengenai peta kebutuhan tempat tinggal di tingkat tapak. Dusun Dusun II menjadi wilayah dengan konsentrasi potensi *backlog* terbesar yaitu sebanyak 40 unit rumah tangga yang belum memiliki rumah pribadi, disusul oleh Dusun Bikang (21 unit), Dusun Air Bulang (20 unit), dan Dusun Harapan Makmur (16 unit).

3.2.4. Bukti Penguasaan Tempat Tinggal



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 15. Persentase Bangunan di
Desa Bikang dengan SHM Sendiri,
2026



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 16. Bukti Penguasaan
Bangunan di Desa Bikang 2026

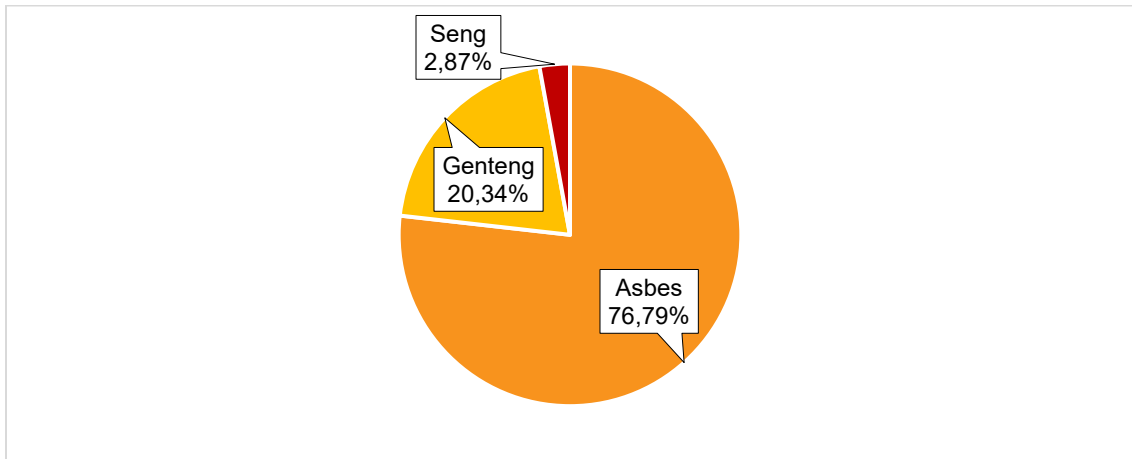
Berdasarkan status legalitas dokumen kepemilikan bangunan rumah tempat tinggal yang berstatus milik sendiri di Desa Bikang pada tahun 2026 (sebanyak 349 unit), mayoritas besar masyarakat telah memiliki kepastian hukum yang sangat kuat. Kategori SHM Sendiri mendominasi secara mutlak yaitu sebanyak 264 unit atau mencapai 90,72%. Sementara itu, terdapat 2 unit rumah atau sebesar 0,57% yang ditopang oleh dokumen Bukti Lainnya (seperti Girik, AJB, Letter C, dan sejenisnya). Di

sisi lain, sebanyak 24 unit rumah atau sebesar 6,88% tercatat Tidak Punya dokumen kepemilikan resmi, dan porsi terkecil yaitu 1 unit rumah berstatus SHM Tidak Sendiri (atas nama keluarga atau pihak lain).

Penting untuk dipahami bahwa dokumen dalam kategori Bukti Lainnya, seperti Girik, merupakan bukti penguasaan atau pendaftaran atas lahan bekas hak milik adat yang belum didaftarkan secara resmi pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karena itu, Girik bukanlah sebuah sertifikat kepemilikan tanah secara hukum formal. Meskipun dokumen-dokumen adat tersebut diakui di tingkat lokal sebagai bukti riwayat kepemilikan, keberadaannya belum memberikan kepastian hukum yang sempurna setara dengan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Dominasi sertifikat Hak Milik atas nama sendiri yang mendekati angka 89% mencerminkan tingginya kesadaran hukum serta kemandirian kepemilikan aset properti di kalangan warga Desa Bikang. Kendati demikian, adanya warga yang masih memegang dokumen bukti lainnya (0,57%) maupun yang belum memiliki dokumen resmi sama sekali (6,88%) menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Desa. Data ini menunjukkan perlunya fasilitasi program sertifikasi tanah massal (seperti PTSL) bersama BPN guna memfasilitasi konversi dokumen adat/tradisional menjadi SHM resmi demi menjamin perlindungan hukum yang utuh dan merata atas aset tempat tinggal seluruh warga Desa Bikang.

3.2.5. Jenis Atap Terluas



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 17. Persentase Hunian di Desa Bikang Menurut Jenis Atap Terluas, 2026

Berdasarkan jenis bahan atau material atap utama yang digunakan pada bangunan rumah tempat tinggal di Desa Bikang pada tahun 2026, penggunaan material Asbes mendominasi secara mutlak, yaitu sebanyak 268 unit rumah atau mencapai 76,79%. Material atap terbanyak kedua yang digunakan oleh masyarakat adalah Genteng, yaitu sebanyak 71 unit rumah atau sebesar 20,34%. Sementara itu, penggunaan Seng mencatatkan porsi sebanyak 10 unit rumah (2,87).

Penggunaan atap biasanya terpengaruh dengan kondisi atau kebiasaan di masing-masing daerah. Untuk daerah yang memiliki cuaca panas biasanya menggunakan atap yang bisa mendeduhkan dan sebaliknya. Di Desa Bikang pada tahun 2026, penggunaan material Asbes sebagai atap terluas tempat tinggal mendominasi secara mutlak, yaitu sebanyak 268 unit rumah atau mencapai 76,79%. Angka ini menunjukkan bahwa bahkan lebih dari rata-rata daerah pada umumnya, sekitar 7 dari 10 rumah tangga di Desa Bikang memilih menggunakan asbes sebagai atap utama tempat tinggal mereka.

Tabel 3. Jumlah Bumbung Bangunan Tempat Tinggal Berdasarkan Dusun dan Jenis Atap Terluas di Desa Bikang, 2026

Dusun	Jumlah Bangunan dengan Atap Terluas		
	Asbes	Genteng	Seng
(1)	(2)	(3)	(4)
Dusun I	120	14	7
Dusun II	101	48	2
Dusun III	47	9	1
Total	268	71	10

Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Jika dikorelasikan dengan cakupan wilayah administratif (jumlah RT), sebaran penggunaan bahan atap di Desa Bikang berbanding lurus dengan skala pemukiman di masing-masing dusun, di mana material Asbes tetap mendominasi secara mutlak di seluruh wilayah. Jika dilihat berdasarkan persebaran wilayah, Dusun I dengan total 141 bangunan memiliki dominasi penggunaan atap asbes paling tinggi, yaitu sebanyak 120 bangunan (85,11%). Selain itu, terdapat penggunaan genteng sebanyak 14 bangunan (9,93%) dan seng sebanyak 7 bangunan (4,96%). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar hunian di Dusun I masih mengandalkan asbes sebagai material utama atap bangunan.

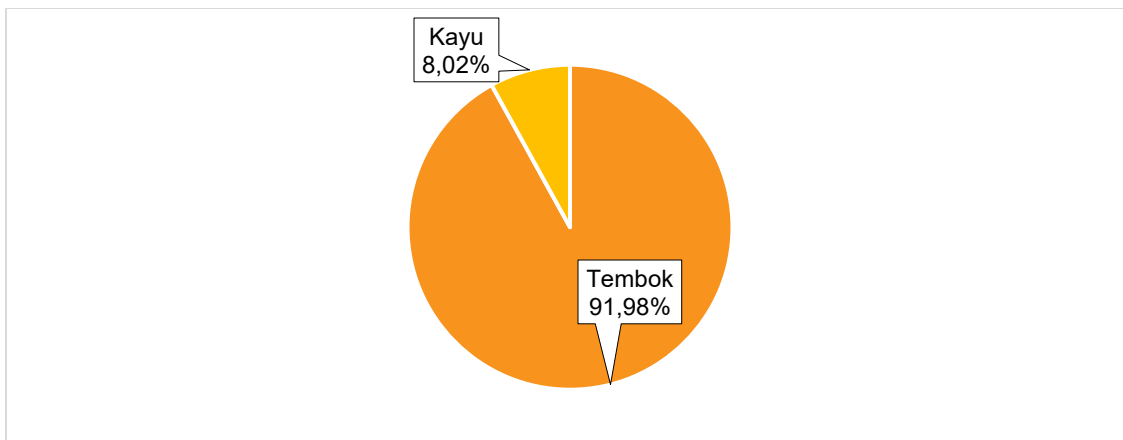
Sementara itu, Dusun II dengan total 151 bangunan menunjukkan variasi penggunaan material atap yang lebih beragam. Penggunaan asbes tetap menjadi yang terbesar dengan 101 bangunan (66,89%), namun dusun ini memiliki jumlah penggunaan genteng tertinggi dibandingkan dusun lainnya, yaitu sebanyak 48 bangunan (31,79%). Selain itu, terdapat penggunaan seng sebanyak 2 bangunan (1,32%). Keragaman material atap di Dusun II menunjukkan adanya variasi karakteristik bangunan dan kemungkinan perbedaan dalam kemampuan masyarakat melakukan peningkatan kualitas hunian.

Adapun Dusun III dengan total 57 bangunan juga masih didominasi oleh atap asbes, yaitu sebanyak 47 bangunan (82,46%). Penggunaan genteng tercatat sebanyak 9 bangunan (15,79%), sedangkan seng sebanyak 1 bangunan (1,75%).

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga di Desa Bikang mayoritas memilih menggunakan atap asbes dan genteng. Minimnya penggunaan atap beton dan seng mengindikasikan preferensi terhadap material yang lebih ringan dan mudah diakses. Korelasi antara jumlah RT, proporsi bahan atap, dan bahaya kandungan asbestos ini memberikan gambaran strategis bagi mitigasi kesehatan pemukiman desa. Dominasi atap asbes yang mencapai lebih dari 60% hingga hampir 90% di seluruh RT di Desa Bikang menuntut langkah konkret dari Pemerintah Desa. Peta sebaran ini menjadi dasar presisi untuk mengagendakan edukasi bahaya serat asbestos kepada para ketua RT dan warga, mendorong sosialisasi ventilasi rumah yang sehat, serta memprioritaskan bantuan perbaikan atap tidak layak atau lapuk (RTLH) mengalihkannya ke material yang lebih aman bagi kesehatan fisik dan pernapasan masyarakat Desa Bikang.

3.2.6. Jenis Dinding Terluas

Dinding berfungsi sebagai penyekat yang membatasi antar ruangan maupun antar bangunan di sisi kanan atau kiri. Dalam pencatatan data oleh Paksian Bikang 2026, jenis dinding yang dicatat adalah jenis yang digunakan oleh rumah tangga. Jika suatu rumah tangga menggunakan dua jenis dinding yang berbeda, maka yang dicatat adalah jenis dinding yang memiliki luas terbesar. Namun, apabila kedua jenis dinding memiliki luas yang sama, maka yang digunakan adalah dinding dengan kode jenis terkecil.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 18. Persentase Hunian di Desa Bikang Menurut Jenis Dinding Terluas, 2026

Berdasarkan hasil pendataan Paksian Bikang Tahun 2026, kondisi hunian di Desa Bikang berdasarkan jenis dinding terluas menunjukkan bahwa sebagian besar bangunan tempat tinggal telah menggunakan material dinding permanen berupa tembok. Dari keseluruhan hunian yang terdata, sebanyak 321 rumah (91,98%) menggunakan dinding berbahan tembok, sedangkan sisanya sebanyak 28 unit rumah (8,02%) masih menggunakan material kayu sebagai dinding utama bangunan.

Secara umum, struktur hunian berdasarkan jenis dinding di Desa Bikang Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang cukup baik, dengan mayoritas rumah telah memenuhi karakteristik bangunan permanen. Data ini dapat menjadi gambaran dalam perencanaan peningkatan kualitas permukiman, khususnya bagi kelompok masyarakat yang masih menempati hunian dengan material dinding kayu. Data ini memberikan dasar yang presisi untuk perencanaan program bantuan perbaikan kualitas hunian, penataan pemukiman, hingga penyaluran program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi keluarga yang membutuhkan perkuatan struktur fisik tempat tinggalnya.

Tabel 4. Jumlah Bumbung Bangunan Tempat Tinggal Berdasarkan Dusun dan Jenis Dinding Terluas di Desa Bikang, 2026

Dusun	Jumlah Bangunan dengan Dinding	
	Tembok	Kayu
(1)	(2)	(3)
Dusun I	128	14
Dusun II	140	10
Dusun III	53	4
Total	321	28

Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Jika dikorelasikan dengan cakupan wilayah administratif (jumlah RT), sebaran penggunaan material dinding utama tempat tinggal di Desa Bikang berbanding lurus dengan skala pemukiman di masing-masing dusun, di mana bahan Tembok (permanen) tetap mendominasi di seluruh wilayah.

Berdasarkan hasil pendataan Paksian Bikang Tahun 2026, kondisi hunian di Desa Bikang berdasarkan jenis dinding terluas menunjukkan bahwa sebagian besar bangunan telah menggunakan material dinding tembok. Dari total 349 bangunan yang terdata, sebanyak 321 bangunan (91,98%) menggunakan dinding tembok, sedangkan 28 bangunan (8,02%) masih menggunakan dinding berbahan kayu.

Jika dilihat berdasarkan persebaran wilayah, Dusun II memiliki jumlah bangunan berdinding tembok paling banyak, yaitu sebanyak 140 bangunan (93,33% dari total 150 bangunan di dusun tersebut). Sementara itu, bangunan dengan dinding kayu di Dusun II tercatat sebanyak 10 bangunan (6,67%). Tingginya dominasi penggunaan dinding tembok menunjukkan bahwa sebagian besar hunian di Dusun II telah menggunakan konstruksi bangunan yang bersifat permanen.

Selanjutnya, Dusun I memiliki sebanyak 128 bangunan (90,14%) dengan dinding tembok dan 14 bangunan (9,86%) dengan dinding kayu dari total 142 bangunan. Proporsi tersebut menunjukkan bahwa meskipun penggunaan tembok

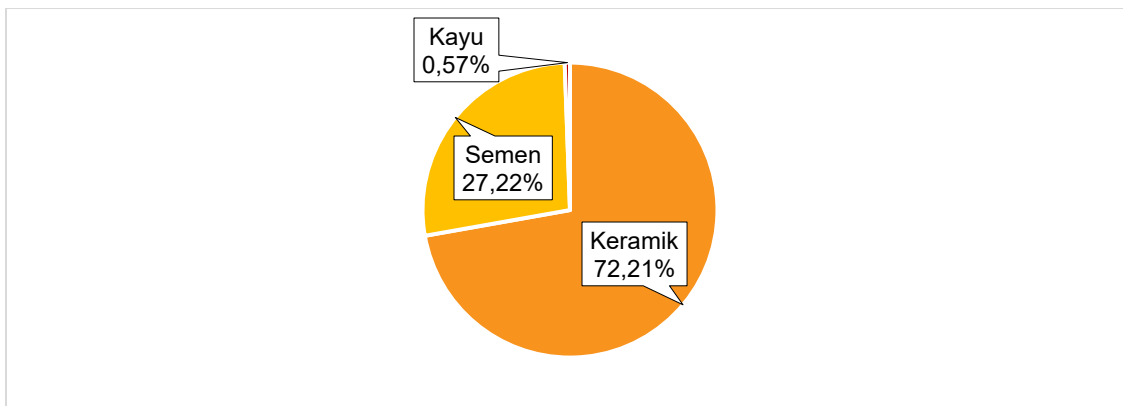
masih mendominasi, Dusun I memiliki jumlah bangunan berdinding kayu paling tinggi dibandingkan dusun lainnya.

Adapun Dusun III memiliki sebanyak 53 bangunan (92,98%) dengan dinding tembok dan 4 bangunan (7,02%) dengan dinding kayu dari total 57 bangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah di Dusun III juga telah menggunakan material dinding permanen.

Secara umum, persebaran jenis dinding hunian di Desa Bikang Tahun 2026 menunjukkan bahwa penggunaan material tembok telah menjadi karakteristik utama bangunan tempat tinggal di seluruh dusun. Dominasi dinding tembok yang mencapai lebih dari 90 persen menggambarkan tingkat kualitas hunian yang relatif baik, sementara keberadaan bangunan berdinding kayu masih menjadi bagian kecil dari variasi karakteristik permukiman masyarakat Desa Bikang. Kendati demikian, keberadaan 28 unit rumah berdinding kayu yang tersebar di seluruh dusun—terutama di Harapan Makmur (110 unit) dan Dusun II (90 unit)—menjadi dasar strategis bagi Pemerintah Desa Bikang dalam merencanakan program bantuan perbaikan kualitas pemukiman serta penyaluran program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara tepat sasaran hingga ke tingkat ketua RT setempat.

3.2.7. Jenis Lantai Terluas

Lantai merupakan bagian dasar atau alas pada sebuah ruangan. Bahan pembuatannya bervariasi, seperti marmer, keramik, granit, tegel atau teraso, semen, kayu, tanah, dan sebagainya. Lantai juga menjadi salah satu variabel dalam penyusunan indikator komposit rumah layak huni, baik dilihat dari jenis lantai yang dominan maupun dari luas lantai per kapita.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 19. Persentase Hunian di Desa Bikang Menurut Jenis Lantai Terluas, 2026

Berdasarkan jenis bahan atau material lantai terluas yang digunakan pada bangunan tempat tinggal di Desa Bikang pada tahun 2026, kondisi hunian di Desa Bikang berdasarkan jenis lantai terluas menunjukkan bahwa sebagian besar bangunan tempat tinggal telah menggunakan material lantai keramik. Dari total 349 bangunan yang terdata, sebanyak 252 bangunan (72,21%) menggunakan lantai keramik, kemudian 95 bangunan (27,22%) menggunakan lantai berbahan semen, sedangkan penggunaan lantai kayu hanya terdapat pada 2 bangunan (0,57%).

Secara keseluruhan, akumulasi penggunaan lantai keramik dan semen yang mencapai lebih dari 99,43% menunjukkan standar kualitas fisik dan kesehatan lingkungan internal pemukiman di Desa Bikang sudah tergolong sangat baik. Dominasi lantai kedap air ini sangat mendukung terciptanya kebersihan rumah tangga dan pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Data sebaran material lantai ini memberikan landasan strategis bagi Pemerintah Desa Bikang dalam mengevaluasi tingkat kesejahteraan material serta merencanakan program peningkatan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan hunian secara berkelanjutan di seluruh dusun.

Tabel 5. Jumlah Bumbung Bangunan Tempat Tinggal Berdasarkan Dusun dan Jenis Lantai Terluas di Desa Bikang, 2026

Dusun	Jumlah Bangunan dengan Lantai		
	Keramik	Semen	Kayu
(1)	(2)	(3)	(4)
Dusun I	111	30	1
Dusun II	100	49	1
Dusun III	41	16	0
Total	252	95	2

Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

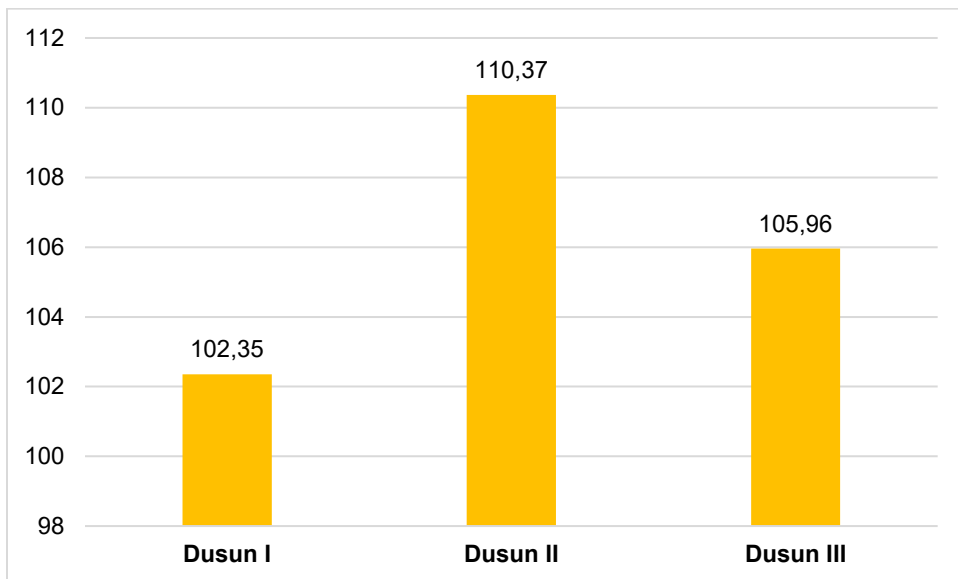
Jika dilihat berdasarkan persebaran wilayah, Dusun I dengan total 142 bangunan memiliki jumlah penggunaan lantai keramik tertinggi, yaitu sebanyak 111 bangunan (78,17%). Selain itu, terdapat 30 bangunan (21,13%) yang menggunakan lantai semen dan 1 bangunan (0,70%) menggunakan lantai kayu. Tingginya proporsi lantai keramik menunjukkan bahwa mayoritas hunian di Dusun I telah menggunakan material lantai yang lebih permanen dan mendukung kenyamanan tempat tinggal.

Sementara itu, Dusun II dengan total 150 bangunan memiliki komposisi lantai yang lebih beragam. Sebanyak 100 bangunan (66,67%) menggunakan lantai keramik, 49 bangunan (32,67%) menggunakan lantai semen, dan 1 bangunan (0,67%) menggunakan lantai kayu. Meskipun lantai keramik masih mendominasi, proporsi penggunaan lantai semen di Dusun II menjadi yang paling tinggi dibandingkan dusun lainnya. Hal ini menunjukkan adanya variasi tingkat kualitas hunian yang dipengaruhi oleh karakteristik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Adapun Dusun III dengan total 57 bangunan juga menunjukkan dominasi penggunaan lantai keramik, yaitu sebanyak 41 bangunan (71,93%), sedangkan penggunaan lantai semen sebanyak 16 bangunan (28,07%). Pada dusun ini tidak ditemukan bangunan dengan lantai berbahan kayu.

3.2.8. Rata-Rata Luas Lantai

Berdasarkan hasil pendataan kondisi hunian tahun 2026, rata-rata luas lantai bangunan tempat tinggal rumah tangga di Desa Bikang secara keseluruhan tercatat sebesar 52,22 m². Tingkat kecukupan dan luas lantai hunian ini merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas hidup masyarakat, tingkat kenyamanan tempat tinggal, serta daya tampung fisik pemukiman di wilayah perdesaan.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 20. Rata-Rata Luas Lantai Hunian di Desa Bikang, 2026

Apabila dilakukan pemetaan secara lebih rinci berdasarkan wilayah administratif, rata-rata luas lantai hunian di Desa Bikang menunjukkan adanya perbedaan karakteristik ukuran tempat tinggal antarwilayah dusun. Secara umum, rata-rata luas lantai hunian berada pada kisaran 100–110 m², yang menggambarkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Desa Bikang memiliki hunian dengan ukuran yang relatif luas dan memadai untuk mendukung aktivitas keluarga.

Dusun II memiliki rata-rata luas lantai hunian terbesar dibandingkan dusun lainnya, yaitu mencapai 110,37 m². Nilai tersebut menunjukkan bahwa hunian di Dusun II cenderung memiliki ukuran bangunan yang lebih luas dibandingkan wilayah lain. Kondisi ini dapat berkaitan dengan karakteristik permukiman, ketersediaan lahan, maupun perkembangan pembangunan rumah di wilayah tersebut.

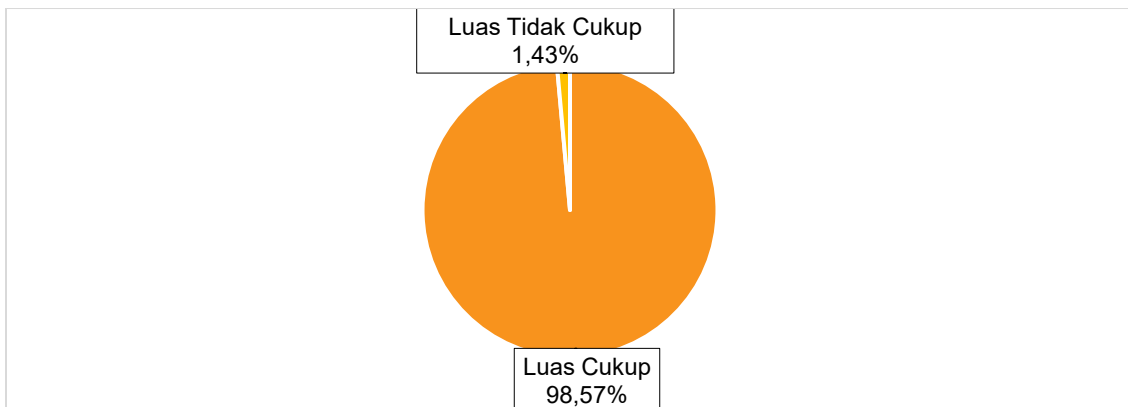
Sementara itu, Dusun III memiliki rata-rata luas lantai hunian sebesar 105,96 m², menempati posisi kedua setelah Dusun II. Ukuran rata-rata ini menunjukkan bahwa sebagian besar hunian di Dusun III juga memiliki luas bangunan yang cukup besar dan relatif mendukung kebutuhan ruang bagi masyarakat.

Adapun Dusun I memiliki rata-rata luas lantai hunian paling rendah, yaitu sebesar 102,35 m². Meskipun demikian, perbedaan luas dengan dusun lainnya tidak terlalu signifikan, sehingga secara umum kondisi hunian antarwilayah di Desa Bikang menunjukkan pola yang relatif seragam.

Kondisi ini dapat menjadi landasan evaluasi bagi pemerintah desa dalam memetakan prioritas program intervensi pemukiman, perbaikan kualitas hunian, maupun pemenuhan standar kecukupan luas lantai per anggota keluarga agar tercipta pemerataan kualitas tempat tinggal yang layak dan sehat di seluruh wilayah Desa Bikang.

3.2.9. *Sufficient Living Space*

Luas lantai rumah sering dijadikan indikator dalam menilai kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Selain itu, luas lantai juga berkaitan dengan aspek kesehatan penghuni. Rumah tangga yang tinggal di hunian dengan luas lantai yang terbatas lebih rentan terhadap penularan penyakit. Untuk mengetahui luas lantai per kapita, dilakukan perhitungan dengan membagi total luas lantai rumah dengan jumlah anggota rumah tangga.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 21. Persentase Hunian di Desa Bikang Menurut Kecukupan Luas Lantai Per Kapita, 2026

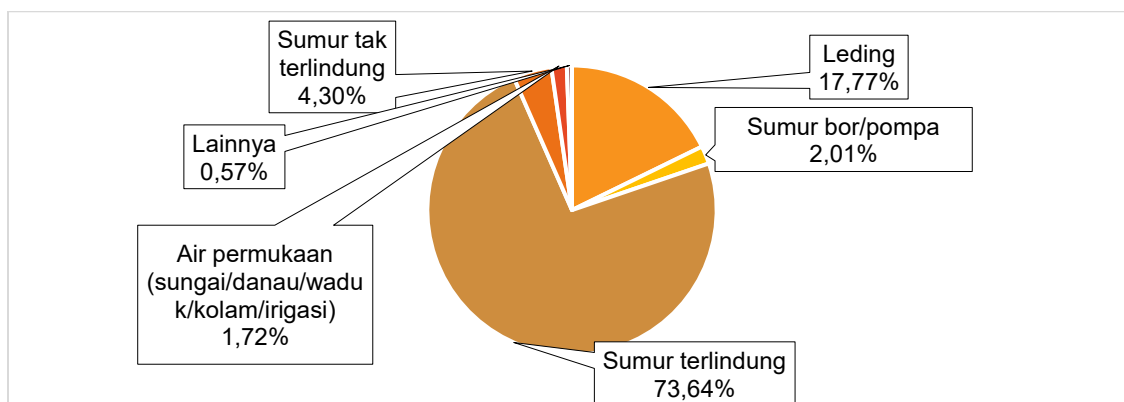
Sufficient living space atau ruang hunian yang memadai didefinisikan sebagai luas lantai per kapita yang mencapai minimal 7,2 meter persegi. Indikator ini menjadi salah satu komponen dalam menentukan kelayakan sebuah rumah, selain akses terhadap air minum yang layak, sanitasi yang memadai, serta kualitas bangunan tempat tinggal. Berdasarkan hasil pendataan Paksian Bikang Tahun 2026, sebagian besar hunian di Desa Bikang telah memenuhi standar kecukupan ruang berdasarkan luas lantai per kapita. Dari total 349 hunian yang terdata, sebanyak 344 hunian (98,57%) termasuk dalam kategori layak dengan luas lantai per kapita minimal 7,2 m². Sementara itu, sebanyak 5 hunian (1,43%) masih berada dalam kategori tidak layak karena memiliki luas lantai per kapita kurang dari 7,2 m².

Tingginya persentase hunian yang memenuhi standar kecukupan ruang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Bikang telah memiliki kondisi tempat tinggal yang cukup memadai dari sisi ketersediaan ruang. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kepadatan hunian secara umum masih berada dalam kondisi terkendali, sehingga ruang yang tersedia dalam rumah relatif mampu mendukung kebutuhan aktivitas dan kenyamanan anggota keluarga.

Di sisi lain, masih terdapat sebagian kecil hunian dengan luas ruang yang belum memenuhi standar, yaitu sebanyak 5 rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keluarga yang kemungkinan memiliki jumlah penghuni relatif besar dibandingkan dengan luas bangunan yang tersedia. Kelompok hunian ini dapat menjadi sasaran prioritas dalam upaya peningkatan kualitas permukiman, baik melalui penambahan ruang, perbaikan rumah, maupun program bantuan peningkatan kelayakan hunian agar seluruh warga dapat menikmati standar rumah tinggal yang layak dan sehat.

3.2.9. Sumber Air Untuk Minum

Air merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kehidupan rumah tangga. Sumber air minum merujuk pada jenis air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, khususnya untuk minum. Dalam pendataan Paksian Bikang, sumber air minum diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, seperti air kemasan bermerk atau isi ulang, air leding atau pompa, sumur atau mata air terlindung, sumur atau mata air tidak terlindung, serta air permukaan, air hujan, atau jenis lainnya. Jika rumah tangga menggunakan lebih dari satu sumber air untuk keperluan minum, maka yang dicatat adalah sumber air yang paling dominan digunakan berdasarkan volume pemakaian.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 22. Persentase Hunian di Desa Bikang Menurut Sumber Air Utama Untuk Minum, 2026

Berdasarkan sumber utama air minum yang digunakan oleh rumah tangga di Desa Bikang pada tahun 2026, dari total 349 rumah tangga yang terdata, sumber air utama masih didominasi oleh sumur terlindung sebanyak 251 rumah tangga (71,92%). Selanjutnya, penggunaan leding tercatat sebanyak 58 rumah tangga (16,62%), sumur tak terlindung sebanyak 23 rumah tangga (6,59%), air isi ulang sebanyak 11 rumah tangga (3,15%), serta sumur bor/pompa sebanyak 6 rumah tangga (1,72%).

Tabel 6. Jumlah Sumber Air minum Berdasarkan Dusun dan Jenis Sumber Air Minum di Desa Bikang, 2026

Dusun	Air isi ulang	Leding	Sumur bor/pompa	Sumur terlindung	Sumur tak terlindung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dusun I	10	58	0	73	1
Dusun II	0	0	6	123	21
Dusun III	1	0	0	55	1
Total	11	58	6	251	23

Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Jika dilihat berdasarkan wilayah, Dusun I memiliki pola sumber air yang lebih beragam dibandingkan dusun lainnya. Dari total 142 rumah tangga, sumber air terbesar berasal dari sumur terlindung sebanyak 73 rumah tangga (51,41%), diikuti oleh leding sebanyak 58 rumah tangga (40,85%), air isi ulang sebanyak 10 rumah tangga (7,04%), dan sumur tak terlindung sebanyak 1 rumah tangga (0,70%). Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Dusun I telah memiliki akses terhadap berbagai pilihan sumber air, dengan pemanfaatan jaringan leding yang cukup tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Sementara itu, Dusun II dengan total 150 rumah tangga didominasi oleh penggunaan sumur terlindung, yaitu sebanyak 123 rumah tangga (82,00%). Selain itu, terdapat 21 rumah tangga (14,00%) yang masih menggunakan sumur tak

terlindung dan 6 rumah tangga (4,00%) menggunakan sumur bor/pompa. Tidak terdapat rumah tangga di Dusun II yang menggunakan leding maupun air isi ulang sebagai sumber air utama. Tingginya penggunaan sumur terlindung menunjukkan bahwa sumber air berbasis sumur masih menjadi pilihan utama masyarakat Dusun II.

Adapun Dusun III dengan total 57 rumah tangga juga menunjukkan dominasi penggunaan sumur terlindung, yaitu sebanyak 55 rumah tangga (96,49%). Sementara itu, hanya terdapat 1 rumah tangga (1,75%) yang menggunakan air isi ulang dan 1 rumah tangga (1,75%) yang menggunakan sumur tak terlindung. Tidak ditemukan penggunaan leding maupun sumur bor/pompa di wilayah ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan air rumah tangga di Dusun III hampir sepenuhnya bergantung pada sumber air tanah melalui sumur terlindung.

Secara umum, pola penggunaan sumber air utama di Desa Bikang Tahun 2026 menunjukkan bahwa sumur terlindung menjadi sumber air yang paling dominan di seluruh dusun. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat masih banyak memanfaatkan sumber air berbasis lingkungan sekitar. Meskipun sebagian besar rumah tangga telah menggunakan sumber air yang lebih terlindungi, keberadaan rumah tangga yang masih menggunakan sumur tak terlindung perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas air bersih dan kesehatan lingkungan permukiman.

Dapat disimpulkan bahwa struktur konsumsi air minum warga Desa Bikang masih didominasi oleh kombinasi air tanah terlindungi dan air isi ulang olahan. Keberadaan warga yang masih bergantung pada sumur tak terlindung serta keterbatasan jangkauan perpipaan leding menegaskan pentingnya intervensi kebijakan untuk memperluas sarana air bersih yang higienis, terjangkau, dan merata hingga ke seluruh lapisan permukiman desa.

3.2.10. Sumber Air Untuk Mandi/Cuci/DII

Selain digunakan untuk keperluan minum, air juga dibutuhkan oleh rumah tangga untuk aktivitas sehari-hari lainnya, seperti mandi, mencuci pakaian, mencuci peralatan makan, dan kebutuhan domestik lainnya. Dalam pendataan, sumber air untuk keperluan non-minum ini dikategorikan ke dalam beberapa jenis, antara lain air dalam kemasan, air leding atau pompa, sumur atau mata air yang terlindung, sumur atau mata air yang tidak terlindung, serta air permukaan, air hujan, atau sumber lainnya.

Tabel 7. Jumlah Sumber Air Mandi Berdasarkan Dusun dan Jenis Sumber Air yang digunakan di Desa Bikang, 2026

Dusun	Sumur bor/pompa	Sumur terlindung	Sumur tak terlindung	Air permukaan (sungai/dana u/waduk/ kolam/ irigasi)	Leding	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dusun I	1	76	1	0	62	2
Dusun II	6	124	14	6	0	0
Dusun III	0	57	0	0	0	0
Total	7	257	15	6	62	2

Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambaran pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan mandi dan cuci di Desa Bikang menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap air tanah, khususnya sumur terlindung. Dari total 349 rumah tangga yang terdata, sumber air mandi paling banyak berasal dari sumur terlindung, yaitu sebanyak 257 rumah tangga (73,64%). Selanjutnya, sumber air dari leding digunakan oleh 62 rumah tangga (17,77%), sumur tak terlindung sebanyak 15 rumah tangga (4,30%), sumur bor/pompa sebanyak 7 rumah tangga (2,01%), air permukaan

(sungai/danau/waduk/kolam/irigasi) sebanyak 6 rumah tangga (1,72%), serta sumber lainnya sebanyak 2 rumah tangga (0,57%).

Jika dilihat berdasarkan persebaran wilayah, Dusun I memiliki sumber air mandi yang paling beragam dibandingkan dusun lainnya. Dari total 142 rumah tangga, sumber air mandi terbesar berasal dari sumur terlindung sebanyak 76 rumah tangga (53,52%), kemudian leding sebanyak 62 rumah tangga (43,66%), serta sumber lainnya sebanyak 2 rumah tangga (1,41%). Selain itu, terdapat masing-masing 1 rumah tangga (0,70%) yang menggunakan sumur bor/pompa dan sumur tak terlindung. Keberagaman sumber air di Dusun I menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki beberapa alternatif akses air untuk kebutuhan mandi, dengan pemanfaatan jaringan leding yang cukup tinggi.

Sementara itu, Dusun II dengan total 150 rumah tangga masih sangat bergantung pada sumber air berbasis sumur. Sebanyak 124 rumah tangga (82,67%) menggunakan sumur terlindung sebagai sumber air mandi utama. Selain itu, terdapat 14 rumah tangga (9,33%) yang menggunakan sumur tak terlindung, 6 rumah tangga (4,00%) menggunakan sumur bor/pompa, dan 6 rumah tangga (4,00%) memanfaatkan air permukaan sebagai sumber air mandi. Tidak terdapat rumah tangga di Dusun II yang menggunakan leding maupun sumber lainnya.

Adapun Dusun III dengan total 57 rumah tangga menunjukkan pola penggunaan sumber air yang lebih homogen. Sebanyak 57 rumah tangga (100%) menggunakan sumur terlindung sebagai sumber air mandi. Tidak ditemukan penggunaan sumur bor/pompa, sumur tak terlindung, air permukaan, leding, maupun sumber lainnya di wilayah ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan air mandi masyarakat Dusun III sepenuhnya dipenuhi melalui sumber air tanah yang terlindungi.

Secara umum, sumber air mandi masyarakat Desa Bikang Tahun 2026 masih didominasi oleh penggunaan sumur terlindung yang tersebar di seluruh dusun. Tingginya pemanfaatan sumber air terlindung menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap sumber air yang relatif aman. Namun, keberadaan rumah tangga yang masih menggunakan sumur tak terlindung

dan air permukaan perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas sanitasi dan penyediaan air bersih yang lebih layak dan berkelanjutan di Desa Bikang.

3.2.11. Sumber Penerangan

Tingkat elektrifikasi di suatu wilayah dapat dilihat dari penggunaan listrik sebagai sumber utama penerangan, baik yang berasal dari PLN maupun non-PLN. Di Desa Bikang, pada tahun 2026, seluruh rumah tangga telah terjangkau oleh akses listrik. Mayoritas besar atau sebanyak 346 rumah tangga (99,14% dari total desa) telah menggunakan Listrik PLN dengan meteran mandiri.

Tabel 8. Jumlah Rumah Tangga yang Berdasarkan Sumber Penerangan Utama dan Dusun di Desa Bikang, 2026

Dusun	Listrik PLN dengan meteran	Listrik PLN tanpa meteran
(1)	(2)	(3)
Dusun I	141	1
Dusun II	148	2
Dusun III	57	0
Total	346	3

Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Jika dilihat berdasarkan persebaran wilayah, Dusun I memiliki jumlah rumah tangga pengguna listrik PLN dengan meteran sebanyak 141 rumah tangga (99,30% dari total 142 rumah tangga), sementara 1 rumah tangga (0,70%) masih menggunakan listrik PLN tanpa meteran. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat di Dusun I telah memiliki akses listrik dengan sistem penggunaan yang terukur.

Sementara itu, Dusun II dengan total 150 rumah tangga tercatat memiliki 148 rumah tangga (98,67%) yang menggunakan listrik PLN dengan meteran dan 2 rumah tangga (1,33%) menggunakan listrik PLN tanpa meteran. Meskipun terdapat sedikit rumah tangga yang belum menggunakan meteran, secara umum tingkat elektrifikasi di Dusun II telah mencapai kondisi yang sangat baik.

Adapun Dusun III menunjukkan capaian akses listrik yang paling optimal, di mana seluruh 57 rumah tangga (100%) telah menggunakan listrik PLN dengan meteran. Tidak terdapat rumah tangga yang menggunakan listrik PLN tanpa meteran di wilayah ini.

Secara keseluruhan, kondisi akses listrik rumah tangga di Desa Bikang Tahun 2026 menunjukkan bahwa jaringan kelistrikan telah menjangkau hampir seluruh masyarakat. Dominasi penggunaan listrik PLN dengan meteran mencerminkan tingkat pelayanan energi yang baik serta adanya kepastian dalam pengukuran dan pengelolaan konsumsi listrik rumah tangga. Sementara itu, keberadaan rumah tangga yang masih menggunakan listrik tanpa meteran dalam jumlah yang sangat kecil dapat menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas layanan dan penataan administrasi kelistrikan di masa mendatang.

3.2.12. Fasilitas BAB (Buang Air Besar)

Kepemilikan fasilitas buang air besar (BAB) menunjukkan sejauh mana rumah tangga memiliki akses terhadap jamban atau kloset yang dapat digunakan secara layak. Dalam pendataan, kepemilikan ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama: rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB dan rumah tangga yang tidak memilikinya.

Bagi rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB, penggunaannya dibedakan lebih lanjut menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Digunakan secara pribadi oleh anggota rumah tangga sendiri,
2. Digunakan secara bersama dengan rumah tangga lain atau pihak tertentu,
3. Menggunakan fasilitas umum seperti MCK komunal atau MCK umum, dan

4. Memiliki jamban tetapi tidak digunakan untuk buang air besar.

Sementara itu, rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB umumnya melakukan aktivitas buang air besar di tempat terbuka, seperti sungai, kali, pantai, sawah, atau lokasi lain yang dianggap biasa dan sudah menjadi kebiasaan setempat. Praktik ini tentu berdampak terhadap kesehatan lingkungan dan risiko penyebaran penyakit, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan sanitasi terbatas. Oleh karena itu, akses terhadap fasilitas sanitasi layak menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 9. Jumlah Fasilitas BAB Berdasarkan Dusun dan Kepemilikan Fasilitas BAB di Desa Bikang, 2026

Dusun	Ada, digunakan hanya ART sendiri	Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu	Ada, di MCK umum
(1)	(2)	(3)	(4)
Dusun I	129	13	0
Dusun II	143	6	1
Dusun III	57	0	0
Total	329	19	1

Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambaran kepemilikan dan pemanfaatan fasilitas Tempat Buang Air Besar (BAB) bagi rumah tangga di Desa Bikang pada tahun 2026 menunjukkan tingkat kemandirian sanitasi yang tergolong sangat tinggi. Dari total 349 rumah tangga yang terdata, sebanyak 329 rumah tangga (94,27%) memiliki fasilitas BAB yang digunakan hanya oleh anggota rumah tangga sendiri. Selain itu, terdapat 19 rumah tangga (5,44%) yang menggunakan fasilitas BAB secara bersama dengan rumah tangga tertentu, sedangkan hanya 1 rumah tangga (0,29%) yang memanfaatkan fasilitas BAB di MCK umum.

Jika dilihat berdasarkan persebaran wilayah, Dusun I dengan total 142 rumah tangga memiliki sebanyak 129 rumah tangga (90,85%) yang telah memiliki fasilitas BAB sendiri. Sementara itu, sebanyak 13 rumah tangga (9,15%) masih menggunakan fasilitas BAB bersama dengan rumah tangga tertentu. Tidak terdapat rumah tangga di Dusun I yang menggunakan fasilitas BAB di MCK umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Dusun I telah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi pribadi.

Selanjutnya, Dusun II dengan total 150 rumah tangga memiliki jumlah rumah tangga dengan fasilitas BAB sendiri sebanyak 143 rumah tangga (95,33%). Selain itu, terdapat 6 rumah tangga (4,00%) yang menggunakan fasilitas BAB bersama dan 1 rumah tangga (0,67%) yang menggunakan MCK umum. Tingginya persentase kepemilikan fasilitas BAB pribadi menunjukkan bahwa akses sanitasi di Dusun II telah tersedia dengan cukup baik.

Adapun Dusun III dengan total 57 rumah tangga menunjukkan kondisi yang paling optimal, di mana seluruh rumah tangga tercatat telah memiliki fasilitas BAB sendiri. Sebanyak 57 rumah tangga (100%) menggunakan fasilitas BAB yang hanya digunakan oleh anggota rumah tangga masing-masing, tanpa adanya penggunaan fasilitas bersama maupun MCK umum.

Secara umum, kondisi fasilitas BAB di Desa Bikang Tahun 2026 menunjukkan bahwa akses sanitasi rumah tangga telah berada pada tingkat yang baik. Dominasi penggunaan fasilitas BAB milik sendiri yang mencapai lebih dari 94 persen menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki fasilitas sanitasi yang lebih layak dan mendukung peningkatan kualitas kesehatan lingkungan. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil rumah tangga yang menggunakan fasilitas bersama atau MCK umum, sehingga peningkatan akses terhadap sanitasi mandiri tetap perlu menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

3.2.13. Jenis Kloset yang Digunakan

Berdasarkan jenisnya, kloset yang digunakan oleh rumah tangga diklasifikasikan ke dalam tiga tipe utama, yaitu kloset leher angsa, plengsengan, dan cemplung atau cubluk. Kategori ini menunjukkan variasi dalam jenis sanitasi yang digunakan rumah tangga, yang berkaitan erat dengan tingkat kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pertanyaan mengenai jenis kloset ini dalam survei hanya ditujukan kepada rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar, baik yang digunakan sendiri oleh anggota rumah tangga, digunakan bersama dengan anggota rumah tangga lain atau pihak tertentu, maupun yang menggunakan fasilitas MCK komunal. Rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB atau yang menggunakan fasilitas umum seperti MCK umum tidak termasuk dalam cakupan pertanyaan ini.

Tabel 10. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Dusun dan Jenis Kloset yang digunakan di Desa Bikang, 2026

Dusun	Leher angsa	Plengsengan tanpa tutup	Cemplung/cubluk
(1)	(2)	(4)	(5)
Dusun I	136	4	2
Dusun II	150	0	0
Dusun III	57	0	0
Total	343	4	2

Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambaran tingkat sarana sanitasi dasar di Desa Bikang pada tahun 2026 memperlihatkan dominasi yang sangat kuat pada penggunaan kloset tipe Leher angsa. Secara keseluruhan, dari total 349 rumah tangga yang terdata, sebanyak 343 rumah tangga (98,28%) menggunakan kloset jenis leher angsa, sedangkan masih terdapat 4 rumah tangga (1,15%) yang menggunakan plengsengan tanpa tutup dan 2 rumah tangga (0,57%) yang menggunakan cemplung/cubluk.

Jika dilihat berdasarkan persebaran wilayah, Dusun I dengan total 142 rumah tangga memiliki variasi jenis kloset yang paling beragam. Sebanyak 136 rumah tangga (95,77%) telah menggunakan kloset leher angsa, sementara 4 rumah tangga (2,82%) masih menggunakan plengsengan tanpa tutup dan 2 rumah tangga (1,41%) menggunakan cemplung/cubluk. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Dusun I telah memiliki fasilitas sanitasi yang layak, meskipun masih terdapat sebagian kecil rumah tangga yang perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan kualitas sarana sanitasi.

Sementara itu, Dusun II dengan total 150 rumah tangga menunjukkan kondisi sanitasi yang lebih baik, di mana seluruh rumah tangga (150 rumah tangga atau 100%) telah menggunakan kloset leher angsa. Tidak ditemukan penggunaan kloset plengsengan tanpa tutup maupun cemplung/cubluk di wilayah ini.

Adapun Dusun III dengan total 57 rumah tangga juga menunjukkan kondisi yang sama, yaitu seluruh rumah tangga (57 rumah tangga atau 100%) menggunakan kloset leher angsa sebagai fasilitas sanitasi utama. Tidak terdapat rumah tangga yang menggunakan jenis kloset plengsengan tanpa tutup maupun cemplung/cubluk.

Secara keseluruhan, kondisi penggunaan jenis kloset di Desa Bikang Tahun 2026 menunjukkan bahwa tingkat akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak telah berada pada kategori sangat baik. Dominasi penggunaan kloset leher angsa yang mencapai hampir seluruh rumah tangga mencerminkan adanya peningkatan kualitas sanitasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fasilitas BAB yang sehat. Namun, keberadaan 6 rumah tangga yang masih menggunakan kloset plengsengan tanpa tutup dan cemplung/cubluk, khususnya di Dusun I, tetap menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan akses sanitasi yang aman dan merata bagi seluruh masyarakat Desa Bikang.

3.2.14. Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja

Ketersediaan tempat pembuangan akhir kotoran (septic tank atau fasilitas serupa) merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga sanitasi dan kesehatan lingkungan rumah tangga. Dari sudut pandang kesehatan, kotoran manusia (tinja) berpotensi menjadi sumber pencemaran serius jika tidak dikelola dengan benar. Pembuangan tinja secara sembarangan, seperti di sungai, kebun, atau tempat terbuka lainnya, dapat mencemari sumber air bersih dan memicu penyebaran penyakit, khususnya penyakit yang ditularkan melalui air (waterborne diseases).

Perilaku ini umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pengetahuan rumah tangga mengenai pentingnya sanitasi, keterbatasan ekonomi, serta kebiasaan turun-temurun yang belum berubah seiring waktu. Rumah tangga dalam kondisi tersebut sering kali tidak menyadari bahwa praktik buang air besar sembarangan berdampak buruk tidak hanya bagi lingkungan sekitar, tetapi juga bagi kesehatan seluruh anggota keluarga.

Tabel 11. Jenis Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja Berdasarkan Dusun di Desa Bikang, 2026

Dusun	Tangki septik	Kolam/sawah/ sungai/danau/laut	Lubang tanah
(1)	(2)	(4)	(5)
Dusun I	134	3	5
Dusun II	150	0	0
Dusun III	55	0	2
Total	339	3	7

Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambaran pengelolaan dan pembuangan akhir kotoran/tinja di Desa Bikang pada tahun 2026 menunjukkan tingkat kesadaran sanitasi aman yang sudah tergolong sangat tinggi. Dari total 349 rumah tangga yang terdata, sebanyak 339

rumah tangga (97,13%) menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran/tinja. Sementara itu, masih terdapat 3 rumah tangga (0,86%) yang membuang limbah tinja ke kolam/sawah/sungai/danau/laut, serta 7 rumah tangga (2,01%) yang menggunakan lubang tanah.

Jika dilihat berdasarkan persebaran wilayah, Dusun I dengan total 142 rumah tangga memiliki penggunaan tangki septik sebanyak 134 rumah tangga (94,37%). Selain itu, terdapat 3 rumah tangga (2,11%) yang masih menggunakan kolam/sawah/sungai/danau/laut sebagai tempat pembuangan akhir dan 5 rumah tangga (3,52%) menggunakan lubang tanah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Dusun I telah memiliki sistem pembuangan tinja yang layak, meskipun masih terdapat sebagian kecil rumah tangga yang perlu ditingkatkan kualitas sanitasinya.

Sementara itu, Dusun II dengan total 150 rumah tangga menunjukkan kondisi sanitasi yang sangat baik, di mana seluruh rumah tangga (150 rumah tangga atau 100%) telah menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran/tinja. Tidak terdapat rumah tangga yang menggunakan kolam/sawah/sungai/danau/laut maupun lubang tanah di wilayah ini.

Adapun Dusun III dengan total 57 rumah tangga juga menunjukkan dominasi penggunaan tangki septik, yaitu sebanyak 55 rumah tangga (96,49%). Selain itu, terdapat 2 rumah tangga (3,51%) yang masih menggunakan lubang tanah sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Tidak ditemukan rumah tangga yang membuang kotoran/tinja ke kolam, sawah, sungai, danau, maupun laut.

Secara umum, kondisi tempat pembuangan akhir kotoran/tinja di Desa Bikang Tahun 2026 menunjukkan bahwa akses sanitasi masyarakat telah berada pada kondisi yang relatif baik. Tingginya penggunaan tangki septik yang mencapai lebih dari 97 persen menggambarkan bahwa sebagian besar rumah tangga telah menerapkan sistem sanitasi yang lebih aman dan mendukung kesehatan lingkungan. Namun, masih adanya sebagian kecil rumah tangga yang menggunakan lubang tanah maupun membuang limbah tinja ke lingkungan terbuka menjadi perhatian dalam upaya peningkatan sanitasi berkelanjutan dan pencapaian

standar rumah layak huni di Desa Bikang. Data ini memberikan acuan yang presisi untuk memfokuskan program bantuan pembuatan tangki septik standar/komunal, guna mencegah pencemaran bakteri E. coli pada air tanah serta mewujudkan lingkungan Desa Bikang yang sepenuhnya bersih, sehat, dan bebas dari kontaminasi limbah sanitasi.

3.2.15. Ketahanan Bangunan

Komponen ketahanan bangunan tempat tinggal (*durable housing*) mencakup kriteria struktur atap, dinding, dan lantai yang menggunakan bahan material bangunan yang permanen. Ketahanan bangunan sebagai salah satu komponen rumah layak huni ditentukan oleh jenis bahan atap, dinding dan lantai yang terluas.

Ketahanan Bangunan mensyaratkan atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah. Jika suatu rumah tangga tinggal di rumah yang tidak memenuhi kriteria jenis bahan bangunan di salah satu dari unsur atap, dinding, atau lantai, maka rumah tangga tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok rumah tangga yang menempati rumah dengan ketahanan bangunan. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi agar suatu rumah dikatakan memiliki ketahanan bangunan yang memenuhi syarat.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 23. Persentase Bangunan Tempat Tinggal di Desa Bikang Menurut Ketahanan Bangunan, 2026

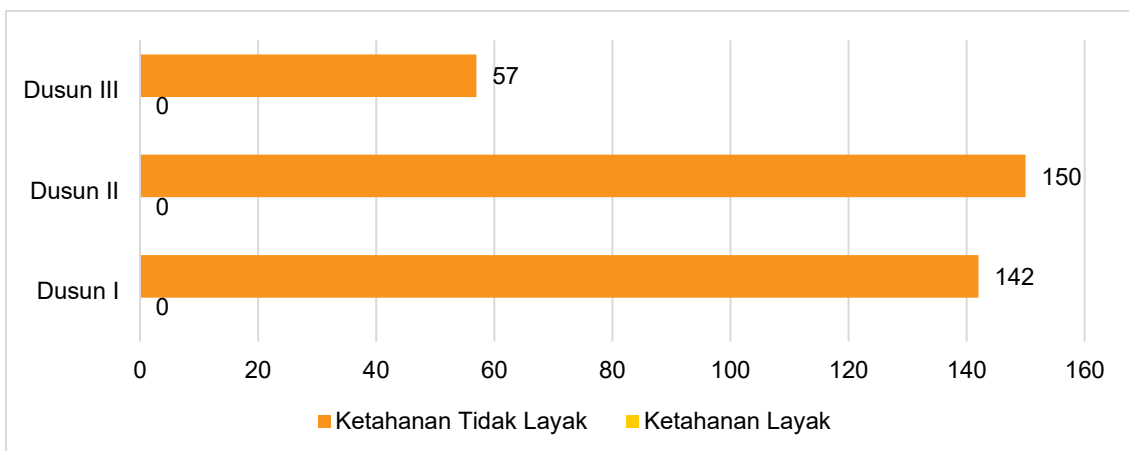
Berdasarkan hasil Pendataan Paksian Tahun 2026, seluruh rumah tangga di Desa Bikang (100 persen) diketahui menempati rumah yang belum memenuhi syarat ketahanan bangunan, sedangkan tidak terdapat rumah tangga yang menempati rumah dengan kondisi bangunan yang memenuhi syarat (0 persen). Penilaian ketahanan bangunan didasarkan pada kondisi komponen utama rumah, yaitu atap, dinding, dan lantai sesuai indikator yang digunakan dalam pendataan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas bangunan tempat tinggal di Desa Bikang masih memerlukan perhatian dan peningkatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian atau seluruh komponen utama bangunan pada rumah penduduk belum memenuhi standar kelayakan konstruksi, sehingga berpotensi memengaruhi keamanan, kenyamanan, dan ketahanan rumah dalam menghadapi pengaruh cuaca maupun risiko kerusakan bangunan.

. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya angka ini adalah penggunaan atap asbes, yang masih banyak dijumpai pada bangunan rumah di desa tersebut. Asbes tergolong sebagai material yang tidak memenuhi syarat

kelayakan karena berisiko terhadap kesehatan dan memiliki daya tahan yang rendah terhadap cuaca ekstrem.

Hasil pendataan ini menjadi dasar bagi Pemerintah Desa Bikang dalam menyusun kebijakan dan menetapkan prioritas pembangunan di bidang perumahan dan permukiman. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas material bangunan, serta pemberian pendampingan kepada masyarakat agar pembangunan maupun perbaikan rumah memenuhi standar ketahanan bangunan. Dengan demikian, kualitas hunian masyarakat diharapkan dapat meningkat secara bertahap sehingga tercipta lingkungan permukiman yang lebih aman, layak, dan berkelanjutan.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 24. Jumlah Bangunan Tempat Tinggal di Desa Bikang Berdasarkan Dusun dan Status Ketahanan Bangunan, 2026

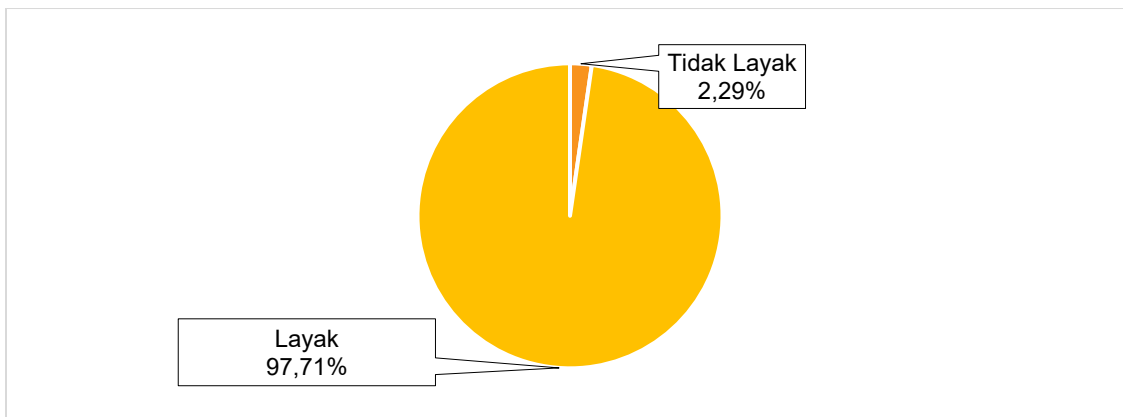
Berdasarkan pembagian wilayah dusun, hasil pendataan Paksian Tahun 2026 menunjukkan bahwa seluruh rumah tangga di Dusun I, Dusun II, dan Dusun III menempati rumah yang belum memenuhi syarat ketahanan bangunan. Masing-masing dusun mencatat presentase sebesar 100 persen rumah tangga yang belum memenuhi indikator ketahanan bangunan, sehingga tidak terdapat perbedaan kondisi antarwilayah dalam aspek ini.

Keseragaman kondisi tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan ketahanan bangunan merupakan isi yang terjadi secara menyeluruh di Desa Bikang, bukan hanya pada dusun tertentu. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas rumah layak huni perlu dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah desa agar seluruh masyarakat memperoleh tempat tinggal yang aman, nyaman, dan memenuhi standar kelayakan bangunan.

3.2.16. Sanitasi Layak

Sanitasi yang layak ditentukan berdasarkan beberapa kriteria utama yang mencakup jenis fasilitas buang air besar, kelayakan kloset, dan sistem pembuangan akhir tinja. Suatu rumah tangga dianggap memiliki sanitasi yang layak apabila fasilitas buang air besar yang digunakan berada di rumah tangga sendiri atau digunakan bersama rumah tangga lain, tetapi bukan di MCK umum. Selain itu, jenis kloset yang digunakan harus berupa kloset leher angsa, karena memiliki sistem penyekat air (water seal) yang mampu mencegah bau serta penyebaran kuman dari saluran pembuangan. Dari sisi pembuangan akhirnya, tinja harus dibuang ke tangki septik atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan untuk wilayah perdesaan juga diperbolehkan menggunakan lubang tanah yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan lingkungan.

Dalam konteks penghitungan rumah layak huni, akses terhadap sanitasi layak menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi. Semakin banyak rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi sesuai standar, maka semakin tinggi pula tingkat capaian rumah layak huni di suatu wilayah. Ketersediaan dan penggunaan sanitasi yang layak tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga mencerminkan kesadaran dan kualitas hidup yang lebih baik di tingkat rumah tangga.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

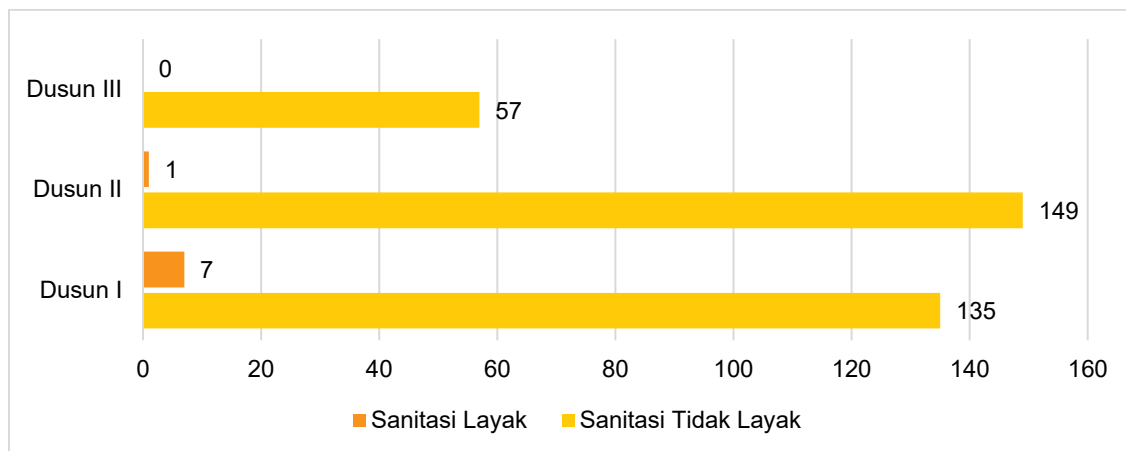
Gambar 25. Persentase Rumah Tangga di Desa Bikang Menurut Akses Terhadap Sanitasi Layak, 2026

Berdasarkan hasil pendataan Paksian Bikang Tahun 2026, kondisi akses sanitasi rumah tangga di Desa Bikang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Dari total 349 rumah tangga yang terdata, sebanyak 341 rumah tangga (97,71%) telah memiliki akses terhadap sanitasi layak, sedangkan 8 rumah tangga (2,29%) masih berada dalam kategori tidak layak.

Tingginya persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Bikang telah memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar dasar kesehatan lingkungan. Kondisi ini didukung oleh tingginya penggunaan fasilitas BAB pribadi, dominasi penggunaan kloset leher angsa, serta pemanfaatan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran/tinja oleh sebagian besar rumah tangga.

Sementara itu, masih terdapat sebagian kecil rumah tangga yang belum memenuhi kriteria sanitasi layak, yaitu sebesar 2,29%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa keluarga yang perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan akses sanitasi, baik melalui penyediaan fasilitas BAB

yang lebih baik, perbaikan sistem pembuangan akhir tinja, maupun peningkatan pemahaman mengenai pentingnya sanitasi aman bagi kesehatan masyarakat.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 26. Rumah Tangga Berdasarkan Dusun dan Akses Terhadap Sanitasi Layak di Desa Bikang, 2026

Jika dilihat berdasarkan persebaran dusun, Dusun II memiliki capaian sanitasi layak tertinggi secara jumlah, yaitu sebanyak 149 rumah tangga (99,33% dari 150 rumah tangga). Sementara itu, hanya terdapat 1 rumah tangga (0,67%) yang masih berada dalam kategori sanitasi tidak layak. Tingginya capaian tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Dusun II telah memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kelayakan.

Selanjutnya, Dusun III menunjukkan kondisi sanitasi yang paling optimal, di mana seluruh 57 rumah tangga (100%) telah memiliki akses terhadap sanitasi layak. Tidak ditemukan rumah tangga dengan kategori sanitasi tidak layak di wilayah ini. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa seluruh masyarakat Dusun III telah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai.

Adapun Dusun I memiliki jumlah rumah tangga dengan sanitasi layak sebanyak 135 rumah tangga (95,07% dari 142 rumah tangga), sedangkan 7 rumah tangga (4,93%) masih termasuk dalam kategori sanitasi tidak layak. Dibandingkan

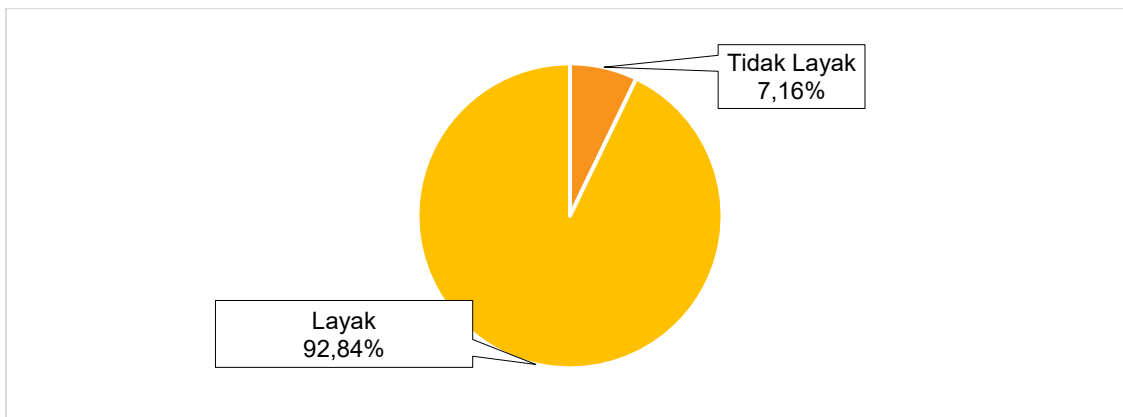
dengan dusun lainnya, Dusun I memiliki jumlah rumah tangga dengan sanitasi tidak layak paling tinggi, sehingga peningkatan kualitas fasilitas sanitasi di wilayah ini perlu menjadi salah satu perhatian dalam program perbaikan lingkungan permukiman.

Secara umum, kondisi sanitasi rumah tangga di Desa Bikang Tahun 2026 menunjukkan capaian yang sangat baik dengan hampir seluruh rumah tangga telah memiliki akses sanitasi layak. Tingginya persentase sanitasi layak di seluruh dusun mencerminkan adanya dukungan terhadap peningkatan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat. Namun, keberadaan sejumlah kecil rumah tangga yang belum memiliki sanitasi layak tetap perlu menjadi perhatian agar seluruh masyarakat Desa Bikang dapat menikmati akses sanitasi yang aman dan berkelanjutan.

3.2.17. Air Minum Layak

Sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu sumber air minum layak dan tidak layak. Rumah tangga dianggap memiliki akses terhadap air minum layak apabila menggunakan sumber air utama yang memenuhi standar kelayakan, seperti air leding, air hujan, atau air dari sumber terlindung. Yang dimaksud dengan air terlindung di sini mencakup sumur bor atau pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung, yaitu sumber air yang terlindung dari kemungkinan kontaminasi limbah atau kotoran.

Sementara itu, bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan atau isi ulang sebagai sumber air minum utama, status "akses air minum layak" baru diberikan apabila sumber air yang digunakan untuk keperluan lainnya seperti mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya juga berasal dari sumber air yang tergolong layak, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan. Dengan demikian, penilaian terhadap akses air minum layak tidak hanya mempertimbangkan sumber air minum itu sendiri, tetapi juga sumber air untuk keperluan sehari-hari lainnya, guna memastikan keberlanjutan dan keamanan penggunaan air dalam kehidupan rumah tangga.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 27. Persentase Rumah Tangga di Desa Bikang Menurut Akses Terhadap Air Minum Layak, 2026

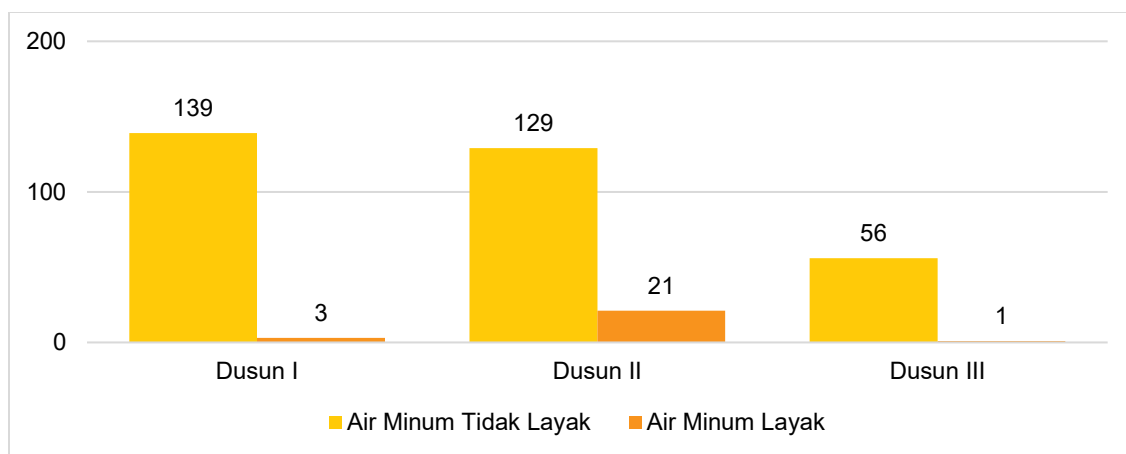
Berdasarkan hasil pendataan Paksian Bikang Tahun 2026, kondisi akses rumah tangga terhadap air minum layak di Desa Bikang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap sumber air yang memenuhi kriteria kelayakan. Dari total 349 rumah tangga yang terdata, sebanyak 324 rumah tangga (92,84%) telah memiliki akses terhadap air minum layak, sedangkan sebanyak 25 rumah tangga (7,16%) masih berada dalam kategori tidak layak.

Tingginya persentase rumah tangga dengan akses air minum layak menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Bikang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar air bersih melalui sumber air yang lebih aman. Kondisi ini didukung oleh dominasi penggunaan sumber air terlindungi, seperti sumur terlindung dan jaringan leding, yang menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan air masyarakat.

Sementara itu, masih terdapat 25 rumah tangga (7,16%) yang belum memiliki akses terhadap air minum layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih

terdapat sebagian kecil masyarakat yang menggunakan sumber air dengan tingkat perlindungan atau kualitas yang belum memenuhi standar kelayakan. Kelompok rumah tangga tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan penyediaan infrastruktur air bersih, perlindungan sumber air, serta edukasi mengenai pengelolaan air minum yang aman.

Secara umum, capaian akses air minum layak di Desa Bikang Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang cukup baik, dengan lebih dari sembilan puluh persen rumah tangga telah memperoleh akses terhadap sumber air yang layak. Namun, peningkatan cakupan layanan air minum tetap diperlukan agar seluruh masyarakat Desa Bikang dapat menikmati akses air bersih yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 28. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Dusun dan Akses Terhadap Air Minum Layak di Desa Bikang, 2026

Jika dilihat berdasarkan persebaran wilayah, Dusun I memiliki jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak sebanyak 139 rumah tangga (97,89% dari total 142 rumah tangga). Sementara itu, terdapat 3 rumah tangga (2,11%) yang masih menggunakan sumber air minum tidak layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa

sebagian besar masyarakat Dusun I telah memiliki akses terhadap sumber air yang memenuhi standar kelayakan.

Selanjutnya, Dusun II memiliki jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak sebanyak 129 rumah tangga (86,00% dari total 150 rumah tangga). Adapun sebanyak 21 rumah tangga (14,00%) masih berada dalam kategori menggunakan sumber air minum tidak layak. Dibandingkan dengan dusun lainnya, Dusun II memiliki jumlah rumah tangga dengan akses air minum tidak layak paling tinggi, sehingga peningkatan kualitas dan ketersediaan sumber air minum menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian.

Sementara itu, Dusun III menunjukkan kondisi akses air minum yang relatif baik, dengan 56 rumah tangga (98,25% dari total 57 rumah tangga) telah memiliki akses terhadap air minum layak. Hanya terdapat 1 rumah tangga (1,75%) yang masih berada dalam kategori air minum tidak layak.

Secara umum, kondisi akses air minum di Desa Bikang Tahun 2026 menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga telah memperoleh sumber air minum yang layak. Namun, masih terdapat sebagian kecil rumah tangga yang belum memiliki akses tersebut, terutama di Dusun II. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam upaya peningkatan pelayanan air bersih, perlindungan sumber air, serta penyediaan infrastruktur air minum yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Desa Bikang.

3.2.18. Air Minum Aman

Air minum aman adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana rumah tangga memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak, dengan lokasi yang berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*), tersedia setiap saat saat dibutuhkan, serta memenuhi syarat kualitas secara fisik—yakni tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, dan tidak berasa. Indikator ini mengacu pada standar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada target pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi yang aman.



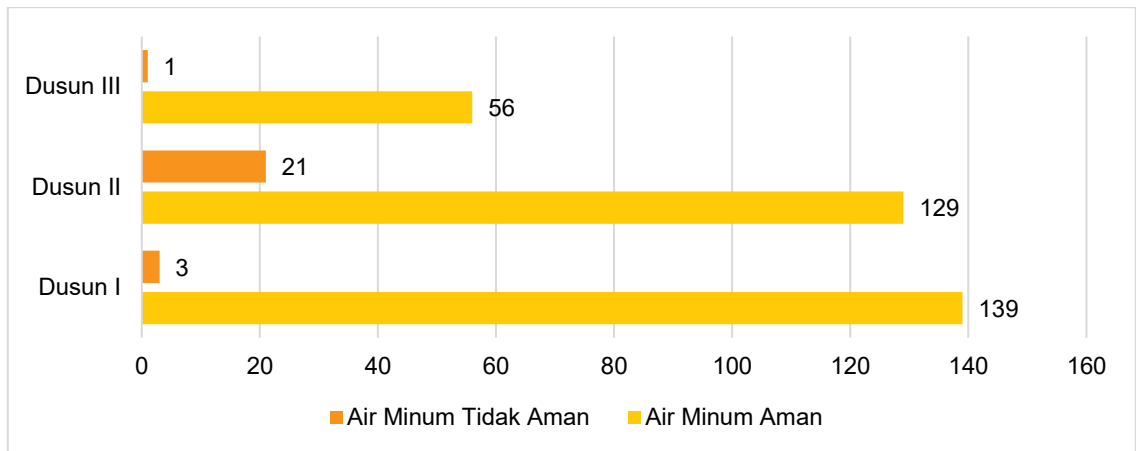
Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 29. Persentase Rumah Tangga di Desa Bikang Menurut Akses Terhadap Air Minum Aman, 2026

Berdasarkan data tahun 2026, sebanyak 92,84 persen rumah tangga di Desa Bikang telah memiliki akses terhadap air minum aman, yang berarti mereka menggunakan sumber air minum layak, berlokasi di dalam atau di halaman rumah (*on premises*), tersedia setiap saat, dan memenuhi syarat kualitas fisik seperti tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Capaian ini mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Bikang telah menikmati layanan air bersih yang memenuhi standar kesehatan dasar.

Namun demikian, sebanyak 7,16 persen rumah tangga sisanya masih belum memiliki akses terhadap air minum yang aman. Kelompok ini kemungkinan masih menggunakan sumber air yang tidak terlindung, terletak jauh dari rumah, tidak tersedia sepanjang waktu, atau tidak memenuhi syarat kualitas fisik air. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan layanan dasar, dan penting bagi pemerintah desa untuk memprioritaskan intervensi pada kelompok rumah tangga ini

agar seluruh warga dapat menikmati hak atas air minum yang sehat, aman, dan berkelanjutan sesuai prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 30. Rumah Tangga di Desa Bikang Menurut Akses Terhadap Air Minum Aman Berdasarkan Dusun, 2026

Secara keseluruhan, kondisi akses rumah tangga terhadap air minum aman di Desa Bikang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menggunakan sumber air yang memenuhi kriteria keamanan. Dari total 349 rumah tangga yang terdata, sebanyak 324 rumah tangga (92,84%) telah memiliki akses terhadap air minum aman, sedangkan 25 rumah tangga (7,16%) masih menggunakan sumber air yang belum termasuk kategori aman.

Jika dilihat berdasarkan persebaran wilayah, Dusun I memiliki kondisi akses air minum aman yang sangat baik. Dari total 142 rumah tangga, sebanyak 139 rumah tangga (97,89%) telah menggunakan sumber air minum aman, sedangkan hanya 3 rumah tangga (2,11%) yang masih menggunakan sumber air minum tidak aman. Tingginya capaian tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Dusun I telah memiliki akses terhadap sumber air yang memenuhi standar keamanan.

Sementara itu, Dusun II dengan total 150 rumah tangga memiliki jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman sebanyak 129 rumah tangga (86,00%). Adapun sebanyak 21 rumah tangga (14,00%) masih berada dalam kategori air minum tidak aman. Dibandingkan dengan dusun lainnya, Dusun II memiliki jumlah rumah tangga dengan akses air minum tidak aman paling tinggi, sehingga peningkatan kualitas sumber air dan penyediaan sarana air minum yang lebih aman perlu menjadi perhatian utama.

Adapun Dusun III menunjukkan kondisi akses air minum aman yang sangat baik, di mana sebanyak 56 rumah tangga (98,25%) dari total 57 rumah tangga telah menggunakan sumber air minum aman. Hanya terdapat 1 rumah tangga (1,75%) yang masih menggunakan sumber air minum tidak aman.

Secara umum, kondisi akses air minum aman di Desa Bikang Tahun 2026 menunjukkan capaian yang positif, dengan lebih dari sembilan puluh persen rumah tangga telah memperoleh akses terhadap sumber air yang aman. Meskipun demikian, masih terdapat 25 rumah tangga yang belum memiliki akses air minum aman, terutama di Dusun II. Kondisi ini menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas layanan air bersih, perlindungan sumber air, serta penyediaan infrastruktur air minum yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Desa Bikang.

3.2.19. Air Minum Bukan Air Permukaan



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 31. Persentase Rumah Tangga di Desa Bikang Menurut Akses Terhadap Air Minum Bukan Air Permukaan, 2026

Berdasarkan data tahun 2026, 100 persen rumah tangga di Desa Bikang tidak menggunakan sumber air permukaan sebagai air minum, seperti sungai, danau, waduk, atau kolam. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rumah tangga telah beralih ke sumber air yang lebih layak dan terlindung, seperti sumur bor, sumur terlindung, leding, atau air isi ulang.

Capaian ini merupakan indikator positif dalam upaya peningkatan akses air bersih, karena air permukaan sangat rentan terhadap pencemaran biologis dan kimia, serta tidak memenuhi syarat kualitas fisik air minum yang aman. Dengan tidak adanya rumah tangga yang mengandalkan air permukaan, risiko terhadap penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare, kolera, atau infeksi kulit dapat ditekan.

Capaian ini merupakan indikator positif dalam upaya peningkatan akses air bersih, karena air permukaan sangat rentan terhadap pencemaran biologis dan kimia, serta tidak memenuhi syarat kualitas fisik air minum yang aman. Dengan tidak adanya rumah tangga yang mengandalkan air permukaan, risiko terhadap penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare, kolera, atau infeksi kulit dapat ditekan.

3.2.20. Air Minum Layak Dasar



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 32. Persentase Rumah Tangga di Desa Bikang Menurut Akses Terhadap Air Minum Bukan Air Permukaan, 2026

Air minum layak dasar menggambarkan kondisi rumah tangga yang tidak hanya menggunakan sumber air minum yang layak, seperti sumur bor, leding, atau air isi ulang, tetapi juga memiliki akses waktu yang efisien, yaitu waktu tempuh kurang dari atau sama dengan 30 menit pulang pergi, termasuk waktu antre, dari rumah ke sumber air. Indikator ini menilai aspek keterjangkauan fisik dan ketersediaan praktis dari layanan air minum. Berdasarkan data tahun 2026, 92,84 persen rumah tangga di Desa Bikang telah memiliki akses terhadap air minum layak dasar, sedangkan 7,16 persen rumah tangga sisanya belum memenuhi kriteria ini.

3.2.21. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria keselamatan konstruksi, memiliki luas bangunan minimal sesuai kebutuhan dasar, serta mendukung kesehatan para penghuninya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, negara berperan dalam menjamin tersedianya rumah yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, yang berada dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, tertata, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian metodologi, rumah layak huni dihitung menggunakan indeks komposit yang disusun dari beberapa indikator utama. Indikator tersebut mencakup ketahanan bangunan yang dilihat dari jenis bahan atap, dinding, dan lantai terluas; kecukupan luas lantai, dengan standar minimal 7,2 meter persegi per kapita; serta akses terhadap sumber air minum layak dan akses terhadap sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi hunian yang ideal bagi masyarakat dalam aspek fisik, lingkungan, dan kesehatan.

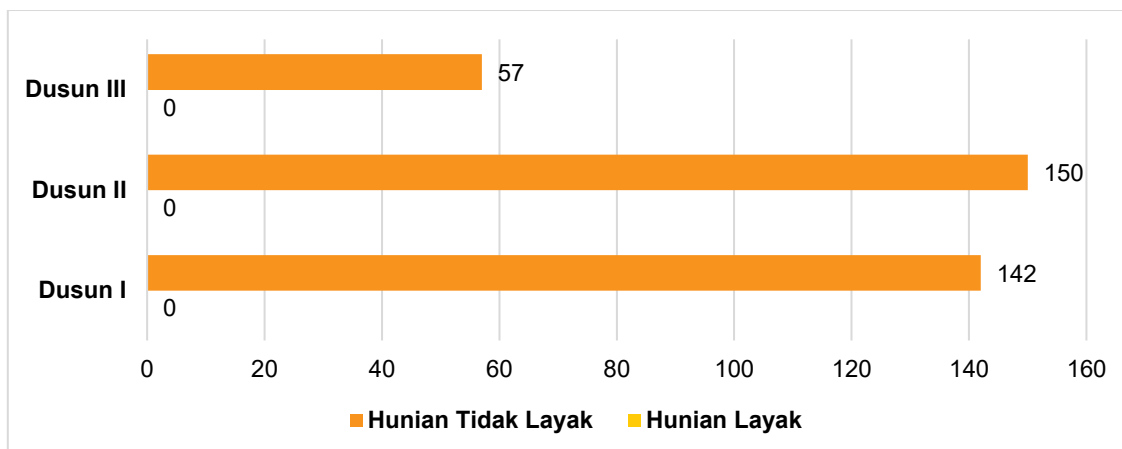


Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 33. Persentase Rumah Tangga di Desa Bikang Menurut Akses Terhadap Rumah Layak Huni, 2026

Pada tahun 2026, menunjukkan bahwa sebanyak 100% rumah tangga di Desa Bikang tergolong sebagai rumah tidak layak huni. Rumah layak huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi standar minimum kelayakan sebagai tempat tinggal yang aman, sehat, dan manusiawi bagi penghuninya. Sebuah rumah dikategorikan layak huni jika memenuhi empat syarat utama berikut:

- 1) Ketahanan bangunan – Struktur rumah harus kokoh dan menggunakan material yang sesuai standar, seperti atap bukan dari asbes, dinding permanen (seperti tembok), dan lantai kuat serta bersih (keramik, semen, ubin, dll).
- 2) Luas lantai per kapita – Luas lantai rumah minimal 7,20 meter persegi per orang, untuk menjamin ruang gerak dan kenyamanan setiap penghuni.
- 3) Akses terhadap air minum layak – Rumah tangga harus memiliki akses ke sumber air bersih yang terlindung, seperti sumur bor, leding, mata air terlindung, air hujan, atau air isi ulang yang aman dikonsumsi.
- 4) Akses terhadap sanitasi layak – Rumah harus memiliki fasilitas buang air besar yang sehat, seperti kloset leher angsa dan sistem pembuangan ke septic tank atau fasilitas sejenis yang aman.



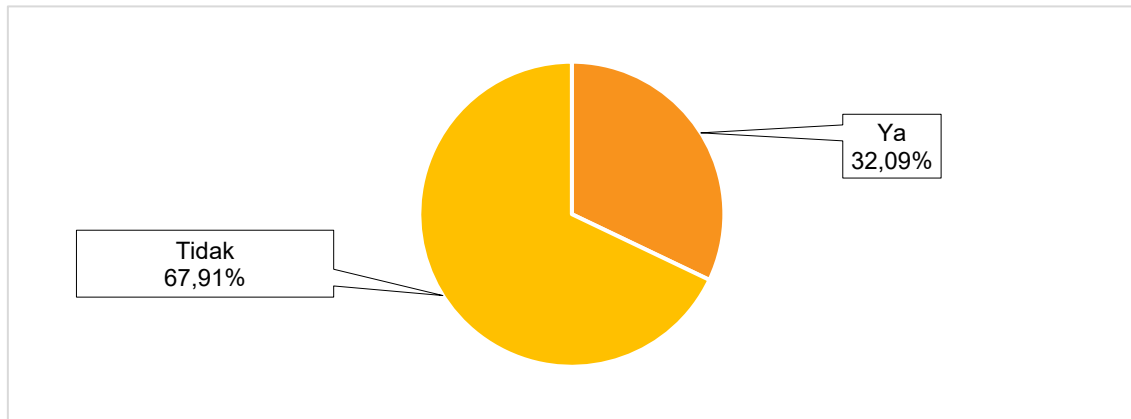
Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 34. Rumah Tangga Berdasarkan Dusun dan Akses Terhadap Rumah Layak Huni di Desa Bikang, 2026

Rumah layak huni ditentukan oleh empat kriteria utama, yaitu ketahanan bangunan, luas lantai minimal 7,20 meter persegi per kapita, akses terhadap air minum layak, dan akses terhadap sanitasi yang layak. Selanjutnya data menunjukkan bahwa seluruh rumah di Desa Bikang menggunakan atap asbes secara merata, sehingga secara otomatis gugur dari kategori rumah layak huni. Hal tersebut menjadi penyebab utama 0% persentase rumah layak di Desa Bikang. Penggunaan atap asbes menyebabkan seluruh rumah di Desa Bikang secara otomatis terkategori sebagai rumah tidak layak huni. Material asbes dinilai tidak memenuhi standar keselamatan dan ketahanan bangunan karena karakteristiknya yang mudah rapuh dan rentan mengalami kerusakan. Selain dari faktor fisik bangunan, penggunaan asbes juga membawa risiko kesehatan yang signifikan bagi para penghuninya, sehingga intervensi perbaikan struktur atap menjadi fokus utama yang krusial untuk meningkatkan kualitas permukiman di desa ini.

3.3. AGRARIA

3.3.1. Keberadaan Rumah Tangga yang Mengusahakan Pertanian/Perkebunan



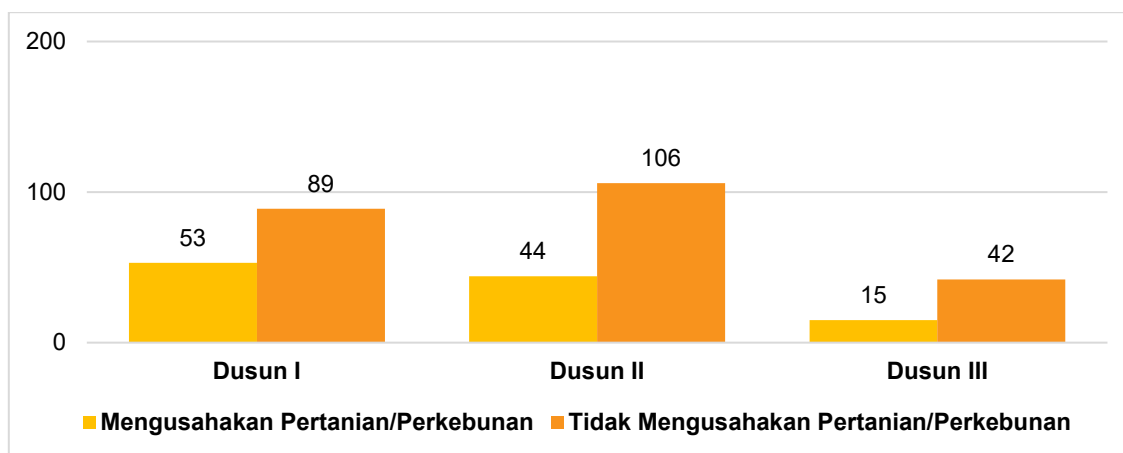
Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 35. Keberadaan Rumah Tangga yang Mengusahakan Pertanian /Perkebunan di Desa Bikang Tahun 2026

Berdasarkan data kegiatan ekonomi sektor basis di Desa Bikang pada tahun 2026, gambaran keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga tidak menggantungkan mata pencaharian utamanya pada sektor bercocok tanam langsung. Dari total 349 rumah tangga di Desa Bikang, sebanyak 112 rumah tangga (32,09%) teridentifikasi aktif mengusahakan kegiatan pertanian atau perkebunan. Sementara itu, bagian terbesar yaitu sebanyak 237 rumah tangga (67,91%) tercatat tidak mengusahakan sektor pertanian/perkebunan.

Proporsi sebesar 32,09% ini menegaskan bahwa sektor pertanian dan perkebunan tetap menjadi salah satu pilar penopang ketahanan pangan serta perekonomian lokal bagi sekitar sepertiga keluarga di Desa Bikang. Di sisi lain, tingginya angka rumah tangga yang tidak mengusahakan lahan (67,91%) mencerminkan adanya pergeseran atau diversifikasi mata pencaharian warga ke sektor-sektor non-agraris, seperti perdagangan, jasa, pertambangan, maupun sektor formal lainnya.

Data ini memberikan acuan strategis bagi Pemerintah Desa Bikang dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi kawasan. Bagi 387 rumah tangga petani/pekebun, intervensi dapat difokuskan pada penguatan kapasitas, fasilitasi bantuan bibit/pupuk, serta optimalisasi akses pasar. Sementara untuk kelompok non-pertanian, pemetaan potensi usaha mikro, perdagangan, dan keterampilan jasa menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 36. Keberadaan Rumah Tangga yang Mengusahakan Pertanian /Perkebunan Berdasarkan Dusun di Desa Bikang Tahun 2026

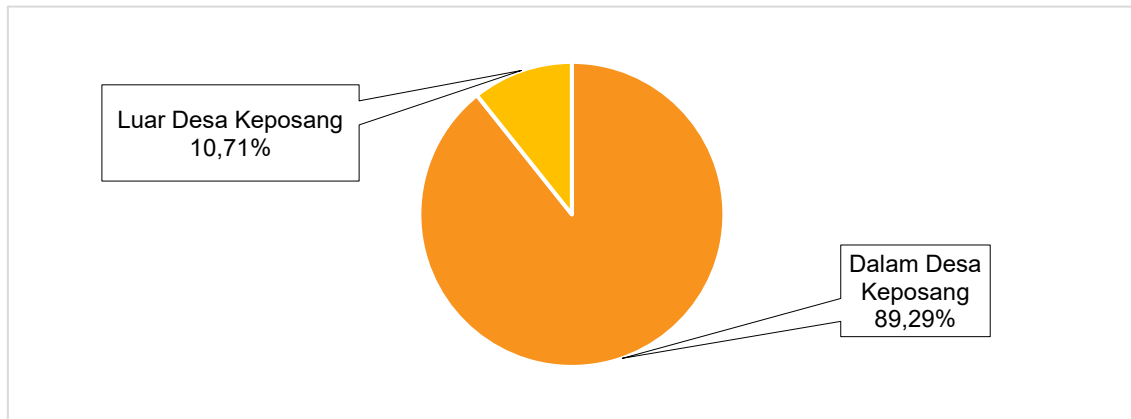
Jika dilihat berdasarkan persebaran wilayah, Dusun I memiliki jumlah rumah tangga yang mengusahakan pertanian/perkebunan sebanyak 53 rumah tangga (37,32% dari total 142 rumah tangga). Sementara itu, sebanyak 89 rumah tangga (62,68%) tidak mengusahakan kegiatan pertanian/perkebunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas pertanian masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Dusun I, sebagian besar rumah tangga memiliki sumber aktivitas ekonomi lain di luar sektor tersebut.

Selanjutnya, Dusun II memiliki jumlah rumah tangga yang mengusahakan pertanian/perkebunan sebanyak 44 rumah tangga (29,33% dari total 150 rumah tangga), sedangkan 106 rumah tangga (70,67%) tidak mengusahakan pertanian/perkebunan. Proporsi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian/perkebunan masih menjadi bagian dari aktivitas masyarakat, namun bukan merupakan kegiatan utama bagi mayoritas rumah tangga di Dusun II.

Adapun Dusun III memiliki jumlah rumah tangga yang mengusahakan pertanian/perkebunan sebanyak 15 rumah tangga (26,32% dari total 57 rumah tangga), sementara 42 rumah tangga (73,68%) tidak mengusahakan sektor tersebut. Dibandingkan dengan dusun lainnya, Dusun III memiliki proporsi rumah tangga yang mengusahakan pertanian/perkebunan paling rendah.

Secara umum, data Tahun 2026 menunjukkan bahwa kegiatan pertanian/perkebunan masih menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Desa Bikang, meskipun sebagian besar rumah tangga tidak menjadikan sektor tersebut sebagai usaha utama. Keberadaan rumah tangga yang masih mengusahakan pertanian/perkebunan menggambarkan bahwa sektor ini tetap memiliki peran dalam mendukung mata pencaharian masyarakat, baik sebagai sumber pendapatan utama maupun sebagai kegiatan ekonomi tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Informasi spasial ini JUGA sangat krusial bagi Pemerintah Desa dalam mengarahkan efektivitas program pembangunan pertanian, seperti penyaluran bantuan bibit, fasilitas alat mesin pertanian (alsintan), penyuluhan kelompok tani, maupun pembangunan jalan usaha tani agar tepat sasaran di wilayah pemukiman berbasis agraris tersebut.

3.3.2. Keberadaan Rumah Tangga yang Mengusahakan Pertanian dengan Lahan Pertaniannya Berada di Dalam Desa Bikang



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

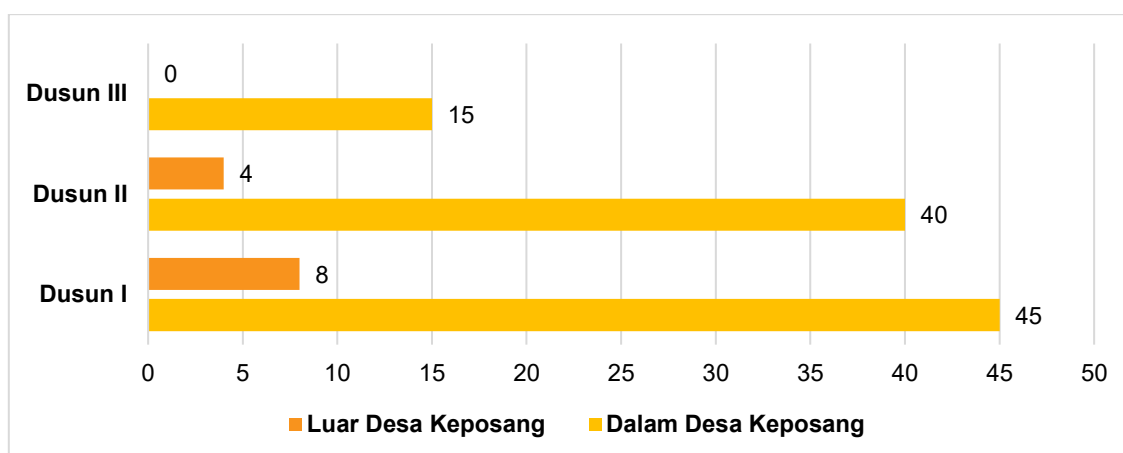
Gambar 37. Keberadaan Rumah Tangga yang Mengusahakan Pertanian /Perkebunan Berdasarkan Lokasi Lahan di Desa Bikang Tahun 2026

Berdasarkan hasil pendataan Paksian Bikang Tahun 2026, rumah tangga yang mengusahakan kegiatan pertanian/perkebunan di Desa Bikang tidak hanya memanfaatkan lahan yang berada di dalam wilayah desa, tetapi juga terdapat sebagian kecil yang mengelola lahan di luar wilayah desa. Dari seluruh rumah tangga yang tercatat mengusahakan pertanian/perkebunan, sebanyak 89,29% mengusahakan lahan yang berada di dalam Desa Bikang, sedangkan 10,71% lainnya mengusahakan lahan yang berada di luar Desa Bikang.

Dominasi pengelolaan lahan di dalam wilayah desa menunjukkan bahwa aktivitas pertanian/perkebunan masyarakat Desa Bikang sebagian besar masih bergantung pada ketersediaan lahan lokal. Kondisi ini mencerminkan bahwa sumber daya lahan yang berada di wilayah desa masih memiliki peran penting dalam mendukung mata pencaharian masyarakat, baik sebagai sumber pendapatan utama maupun sebagai usaha tambahan rumah tangga.

Sementara itu, keberadaan rumah tangga yang mengusahakan lahan di luar Desa Bikang sebesar 10,71% menunjukkan adanya mobilitas usaha pertanian yang melampaui batas administratif desa. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan ketersediaan lahan di dalam desa, kepemilikan lahan warisan di wilayah lain, peluang pemanfaatan lahan yang lebih produktif, maupun strategi rumah tangga dalam meningkatkan hasil usaha pertanian/perkebunan.

Secara umum, pola pemanfaatan lokasi lahan pertanian/perkebunan di Desa Bikang Tahun 2026 menunjukkan bahwa kegiatan pertanian masih berorientasi pada pemanfaatan potensi lokal, dengan sebagian besar rumah tangga mengelola lahan di wilayah desa sendiri. Kondisi ini menjadi gambaran penting dalam melihat keterkaitan antara sumber daya lahan, aktivitas ekonomi masyarakat, dan pengembangan sektor pertanian/perkebunan di Desa Bikang.



Sumber: Paksian Bikang Tahun 2026

Gambar 38. Keberadaan Rumah Tangga yang Mengusahakan Pertanian /Perkebunan Berdasarkan Lokasi Lahan dan Dusun di Desa Bikang Tahun 2026

Gambaran sebaran lokasi lahan yang diusahakan oleh rumah tangga petani/pekebun di Desa Bikang menunjukkan bahwa mayoritas kegiatan bercocok tanam dilakukan di dalam batas wilayah desa sendiri. Jika dilihat berdasarkan persebaran dusun, Dusun I memiliki jumlah rumah tangga pengusaha pertanian/perkebunan terbanyak, yaitu sebanyak 53 rumah tangga. Dari jumlah

tersebut, sebanyak 45 rumah tangga (84,91%) mengusahakan lahan di dalam Desa Bikang, sedangkan 8 rumah tangga (15,09%) mengelola lahan di luar Desa Bikang. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas pertanian/perkebunan di Dusun I masih didominasi oleh pemanfaatan lahan lokal, meskipun terdapat sebagian masyarakat yang melakukan pengelolaan lahan di luar wilayah desa.

Selanjutnya, Dusun II memiliki sebanyak 44 rumah tangga yang mengusahakan pertanian/perkebunan. Sebanyak 40 rumah tangga (90,91%) memanfaatkan lahan yang berada di dalam Desa Bikang, sementara 4 rumah tangga (9,09%) mengusahakan lahan di luar desa. Tingginya proporsi pemanfaatan lahan dalam wilayah desa menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pertanian/perkebunan masyarakat Dusun II masih bergantung pada potensi lahan yang tersedia di lingkungan sekitar.

Adapun Dusun III memiliki jumlah rumah tangga pengusaha pertanian/perkebunan paling sedikit, yaitu sebanyak 15 rumah tangga. Seluruh rumah tangga tersebut (100%) tercatat mengusahakan lahan yang berada di dalam Desa Bikang dan tidak terdapat rumah tangga yang mengelola lahan di luar wilayah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertanian/perkebunan di Dusun III sepenuhnya berbasis pada sumber daya lahan lokal.

Tingginya proporsi penggunaan lahan di dalam batas desa (89,39%) menegaskan bahwa aktivitas ekonomi agraris warga Desa Bikang sangat bergantung pada daya dukung lingkungan dan ketersediaan lahan lokal. Informasi spasial ini menjadi rujukan penting bagi Pemerintah Desa dalam perumusan Peraturan Desa (Perdes) terkait tata ruang wilayah, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), serta perencanaan pembangunan infrastruktur pendukung pertanian—seperti jalan usaha tani dan irigasi desa—agar intervensi kebijakan benar-benar memberi dampak langsung bagi optimalisasi lahan di dalam Desa Bikang.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). Statistik perumahan dan permukiman Provinsi Jawa Timur 2024.

<https://jatim.bps.go.id/id/publication/2026/07/23/7b29ab5b604422d50937e48a/statistik-perumahan-dan-permukiman-provinsi-jawa-timur-2024.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. (2023). Statistik perumahan Kabupaten Bandung tahun 2023.

<https://bandungkab.bps.go.id/id/publication/2024/12/10/6cef83c102377546a7afe40b/statistik-perumahan-kabupaten-bandung-tahun-2023.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo. (2022). Housing statistics of Boalemo Regency 2022.

<https://boalemokab.bps.go.id/id/publication/2023/11/10/758ab8406c014b73fb16f594/housing-statistics-of-boalemo-regency-2022.html>

Lampiran 1. Kuesioner Paksian Bikang Tahun 2026 (lanjutan)

BLOK IV. KETERANGAN ANGGOTA KELUARGA					
Nomor Urut Anggota Keluarga	Tanggal Lahir	Agama	Status Perkawinan	Pendidikan Terakhir/Ijazah Terakhir	Pekerjaan
401	408	409	410	411	412
		☐	☐	☐	☐ ☐ ☐
		☐	☐	☐	☐ ☐ ☐
		☐	☐	☐	☐ ☐ ☐
		☐	☐	☐	☐ ☐ ☐
		☐	☐	☐	☐ ☐ ☐
		☐	☐	☐	☐ ☐ ☐
		☐	☐	☐	☐ ☐ ☐
		☐	☐	☐	☐ ☐ ☐
		☐	☐	☐	☐ ☐ ☐
		☐	☐	☐	☐ ☐ ☐
Kode 409 Agama 1. Islam 2. Kristen, termasuk Kristen Protestan, Advent, Pantekosta, Baptis, Kharismatik, dan lain-lain 3. Katolik 4. Hindu 5. Buddha 6. Khonghucu 7. Penghayat kepercayaan 8. Lainnya		Kode 410 Status Perkawinan 1. Belum Kawin 2. Kawin 3. Kawin Tercatat 4. Kawin Belum Tercatat 5. Cerai Hidup 6. Cerai Hidup Tercatat 7. Cerai Hidup Belum Tercatat 8. Cerai Mati		Kode 411 Pendidikan Terakhir/Ijazah Terakhir 1. Tidak/Belum Sekolah 2. Belum Tamat SD/Sederajat 3. Tamat SD/Sederajat 4. Tamat SMP/Sederajat 5. Tamat SMA/Sederajat 6. Perguruan Tinggi (Lampiran)	

BLOK V. FILTER RUMAH TANGGA	
501	Apakah hanya satu keluarga yang tinggal di rumah ini? 1. Ya → lanjut BLOK VI ☐ 2. Tidak → lanjut 502
502	Apakah kepala keluarga menguasai rumah ini? 1. Ya → lanjut BLOK VI ☐ 2. Tidak → lanjut 503
503	Siapa nama kepala keluarga yang menguasai rumah? → berhenti

BLOK VI. KETERANGAN RUMAH	
BLOK VIA. KETERANGAN JUMLAH ART, KEPEMILIKAN, LUAS LANTAI	
601	Jumlah anggota keluarga yang menempati rumah
602	A. Status kepemilikan bangunan tempat tinggal ☐ ☐ 1. Milik sendiri 2. Kontrak/Sewa → lanjut 603 3. Bebas sewa → lanjut 603 4. Dinas → lanjut 603 5. Lainnya, tuliskan: → lanjut 603

BLOK VI. KETERANGAN RUMAH			
BLOK VIA. KETERANGAN JUMLAH ART, KEPEMILIKAN, LUAS LANTAI (lanjutan)		BLOK VIC. KETERANGAN SANITASI	
602.	B. Bukti kepemilikan lahan	607.	A. Apakah memiliki fasilitas tempat buang air besar dan siapa saja yang menggunakan? B. Apakah jenis kloset yang digunakan? C. Di manakah tempat pembuangan akhir tinja?
	1. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART ☐ ☐ 2. SHM bukan atas nama ART dengan perjanjian pemanfaatan tertulis 3. SHM bukan atas nama ART tanpa perjanjian pemanfaatan tertulis 4. Sertifikat selain SHM (SHGB, SHMSRS) 5. Surat bukti lainnya (Girik, AKB, Letter C, dll) 6. Tidak punya		1. Ada, digunakan hanya ART sendiri ☐ ☐ 2. Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu 3. Ada, di MCK komunal 4. Ada, di MCK umum/ siapa pun yang menggunakan → lanjut 608.A 5. Ada, ART tidak menggunakan → lanjut 608.A 6. Tidak ada fasilitas → lanjut 608.A 1. Leher angsa 2. Plengsengan dengan tutup ☐ ☐ 3. Plengsengan tanpa tutup 4. Cemplung/cubluk 1. Tangki septik ☐ ☐ 2. IPAL 3. Kolam/sawah/sungai/danau/laut 4. Lubang tanah 5. Pantai/tanah lapang/kebun 6. Lainnya
BLOK VIB. KETERANGAN BAHAN BANGUNAN			
603	Berapa luas lantai m ² bangunan rumah? (pembulatan) ☐ ☐ ☐ ☐	BLOK VID. KETERANGAN AIR LAYAK MINUM	
604	Apakah bahan bangunan utama atap rumah terluas? 1. Beton 2. Genteng 3. Seng 4. Kayu/sirip 5. Asbes 6. Bambu/jeram/juk/dandan/rumbia 7. Lainnya ☐ ☐	608. A. Apakah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum? 1. Air kemasan bermerk → lanjut 609.A 2. Air isi ulang → lanjut 609.A 3. Leding → lanjut 608.C 4. Sumur bor/pompa → lanjut 608.C 5. Sumur terlindung → lanjut 608.C 6. Sumur tak terlindung → lanjut 608.C 7. Mata air terlindung → lanjut 608.C 8. Mata air tak terlindung → lanjut 608.C 9. Air permukaan (sungai/canai/waduk/kolam/irigasi) → lanjut 609.A 10. Air hujan → lanjut 609.A 11. Lainnya → lanjut 609.A	
605	Apakah bahan bangunan utama dinding rumah terluas? 1. Tembok 2. Plesteran anyaman bambu/kawat 3. Kayu/papan/batang kayu 4. Bambu/anyaman bambu 5. Lainnya ☐ ☐		
606.	Apakah bahan bangunan utama lantai rumah terluas? 1. Marmer/gamit 2. Keramik ubin/tegel/temso 3. Parket/vinil/karpet 4. Kayu/papan 5. Semen/bata merah 6. Bambu/tanah 7. Lainnya ☐ ☐		

Lampiran 1. Kuesioner Paksian Bikang Tahun 2026 (lanjutan)

BLOK VI. KETERANGAN RUMAH			
BLOK VID. KETERANGAN AIR LAYAK MINUM (lanjutan)			
608.	B. [Jika 308.A = 3 (leding)] Apa media utama yang digunakan rumah tangga untuk mengakses sumber air utama untuk minum?	1. Persipaan meteran 2. Persipaan tanpa meteran 3. Hidran umum 4. Keran umum 5. Terminal air 6. Tidak ada 7. Tidak tahu	☐ ☐
	C. [Jika 308.A = 4, 5, 6, 7, 8 (sumur/pompa/mata air)] Berapa jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat?	1. < 10 m 2. ≥ 10 m 8. Tidak tahu	☐ ☐
609	A. Di manakah lokasi sumber/fasilitas air minum tersebut?	1. Di rumah/kawasan dalam pagar rumah → lanjut 610 2. Di luar kawasan pagar rumah	☐ ☐
	B. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil air ke sumber/fasilitas air sampai kembali lagi ke rumah menit 998. Tidak tahu		
610.	Dalam setahun terakhir apakah rumah tangga pernah mengalami kekurangan air minum untuk kebutuhan rumah tangga selama minimal 24 jam?	1. Ya 2. Tidak 8. Tidak tahu	☐ ☐
611.	Bagaimana kondisi fisik sumber air utama untuk minum menurut Anda	A. Keruh 1) Ya 5) Tidak B. Berwarna 1) Ya 5) Tidak C. Berasa 1) Ya 5) Tidak D. Berbusa 1) Ya 5) Tidak E. Berbau 1) Ya 5) Tidak	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

BLOK VI. KETERANGAN RUMAH			
612.	Apakah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi/cuci/di?	1. Air kemasan bermerk 2. Air isi ulang 3. Leding 4. Sumur bor/pompa 5. Sumur terlindung 6. Sumur tak terlindung 7. Mata air terlindung 8. Mata air tak terlindung 9. Air permukaan (sungai/cinau/waduk/kolam/irigasi) 10. Air hujan 11. Lainnya	☐ ☐
BLOK VIE. KETERANGAN KEBERADAAN LISTRIK			
613.	Apakah sumber penerangan rumah tangga ini?	1. Listrik PLN dengan meteran 2. Listrik PLN tanpa meteran 3. Listrik non-PLN 4. Bukan listrik	☐

BLOK VII. KETERANGAN LANSIA	
701.	Apakah di rumah ini terdapat anggota keluarga yang berusia di atas 60 tahun? 1. Ya 2. Tidak ada ☐ ☐

BLOK VIII. KETERANGAN PUTUS SEKOLAH													
701.	Apakah di rumah ini terdapat anak berusia 7-18 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi? 1. Ya 2. Tidak ada ☐ (Jika Ya, Tuliskan Nama Anggota Keluarga dan Pendidikan Terakhir) Pendidikan Terakhir <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nama</td> <td style="width: 50%;">Pendidikan Terakhir</td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>a)</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>b)</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>c)</td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td>d)</td> </tr> <tr> <td>e)</td> <td>e)</td> </tr> </table>	Nama	Pendidikan Terakhir	a)	a)	b)	b)	c)	c)	d)	d)	e)	e)
Nama	Pendidikan Terakhir												
a)	a)												
b)	b)												
c)	c)												
d)	d)												
e)	e)												

BLOK IX. PRODUKTIVITAS LAHAN				
901.	Apakah terdapat anggota keluarga yang mengusahakan pertanian?	1. Ya 2. Tidak ada → berhenti ☐ ☐	☐ ☐	
902.	Apakah ada lahan pertanian diusahakan di Desa (sesuai dengan 104)?	1. Ya 2. Tidak ada → berhenti ☐ ☐	☐ ☐	
Pertanyaan	Komoditas 1	Komoditas 2	Komoditas 3	Komoditas 4
903.	Apakah nama komoditas yang diusahakan di lahan di Desa (sesuai dengan 104)?			
904.	Berapa luas lahan yang diusahakan untuk komoditas tersebut (sesuai dengan 903)?	m ²	m ²	m ²
905.	Berapa produksi komoditas tersebut dalam setahun?	kg	kg	kg

BLOK X. CATATAN	

Lampiran 1. Kuesioner Paksian Bikang Tahun 2026 (lanjutan)

LAMPIRAN			
Kode 412 Pekerjaan			
1. Pelajar/Mahasiswa	38. Presiden	75. Tukang Listrik	112. Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar
2. Mengurus Rumah Tangga	39. Pelaut	76. Perancang Busana	113. Karyawan BUMD
3. Belum/Tidak Bekerja	40. Pemeluk Agama	77. Anggota DPR-RI	114. Penata Rias
4. Buruh Harian Lepas	41. Transportasi	78. Dosen	115. Duta Besar
5. Wiraswasta	42. Pastor	79. Psikiater/Psikolog	116. Anggota DPD
6. Petani/Pekebun	43. Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	80. Buruh Usaha Hotel dan Penginapan Lainnya	117. Tukang Cukur
7. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	44. Promotor Acara	81. Pialang	118. Buruh Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan
8. Karyawan Honorer	45. Anggota Legislatif	82. Dokter Swasta	119. Penyiar Televisi
9. Karyawan Swasta	46. Pengrajin	83. Guru Swasta	120. Paranormal
10. Guru	47. Buruh Migran	84. Buruh Peternakan	121. Jasa Konsultasi Manajemen dan Teknis
11. Kepolisian RI (Polri)	48. Usaha Jasa Pengerah Tenaga Kerja	85. Tukang Gigi	122. Tukang Sumur
12. Pedagang	49. Walikota	86. Arsitek	123. Wartawan
13. Buruh Tani/Perkebunan	50. Kontraktor	87. Pedagang Barang Kelontong	124. Anggota DPRD Provinsi
14. Pensiunan	51. Juru Masak	88. Pemilik Perusahaan	125. Buruh Usaha Jasa Hiburan dan Pariwisata
15. Nelayan/Perikanan	52. Wakil Presiden	89. Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	126. Pembantu Rumah Tangga
16. Perangkat Desa	53. Konsultan	90. Wakil Bupati	127. Pengacara
17. Karyawan BUMN	54. Bupati	91. Montir	128. Penambang
18. Satpam/Security	55. Penyiar Radio	92. Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	129. Anggota BPK
19. Dokter	56. Anggota Mahkamah Konstitusi	93. Ahli Pengobatan Alternatif	130. Jasa Pengobatan Alternatif
20. Sopir	57. Seniman	94. Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi	131. Pemilik Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan
21. Perdagangan	58. Paraji	95. Pemilik Usaha Warung, Rumah Makan dan Restoran	132. Penata Busana
22. Bidan	59. Penulung	96. Tukang Anyaman	133. Gubernur
23. Lainnya	60. Pengrajin Industri Rumah Tangga	97. Tukang Sol Sepatu	134. Apoteker
24. Pedagang Keliling	61. Tukang Kayu	98. Penerjemah	135. Dosen Swasta
25. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	62. Notaris	99. Wakil Gubernur	136. Dukun Tradisional
26. Pendeta	63. Buruh Usaha Jasa Informasi dan Komunikasi	100. Bidan Swasta	137. Tukang Cuci
27. Tukang Las/Pandai Besi	64. Pilot	101. Pemilik Usaha Jasa Hiburan dan Pariwisata	138. Peneliti
28. Anggota DPRD Kabupaten/Kota	65. Biarawati	102. Tukang Jahit	139. Tukang Listrik
29. Konstruksi	66. Industri	103. Wakil Walikota	140. Perancang Busana
30. Buruh Nelayan/Perikanan	67. Tabib	104. Konsultan Manajemen dan Teknis	
31. Mekanik	68. Imam Masjid	105. Pemilik Usaha Informasi dan Komunikasi	
32. Tukang Batu	69. Akuntan	106. Perawat Swasta	
33. Perawat	70. Peneliti	107. Tukang Kue	
34. Peternak	71. Dosen Swasta	108. Ustaz/Mubaligh	
35. Kepala Desa	72. Dukun Tradisional	109. Arsitektur/Desainer	
36. Penata Rambut	73. Tukang Cuci	110. Pemilik Usaha Hotel dan Penginapan Lainnya	
37. Anggota Kabinet/Kementerian	74. Peneliti	111. Kepala Daerah	



PAKSIAK

KEPOSANG

Pendaftaran Lengkap Kependudukan,
Sosial, Agraria, dan Hunian



KEPENDUDUKAN



SOSIAL



AGRARIA



HUNIAN

